



Pemerintah Kota Bukittinggi



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

**TAHUN
2018**





WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LKIP sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



M. RAMLAN NURMATIAS, SH
WALIKOTA BUKITTINGGI

Substansi laporan ini merupakan wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada Masyarakat dan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat yang diterima.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja Tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan



Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Materi laporan antara lain menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bukittinggi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum maksimal pencapaiannya. Keberadaan laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya serta monitoring evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Bukittinggi, Maret 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021. Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 yang terdiri dari 17 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 26 indikator kinerja utama dan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Misi pertama terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi kedua terdiri dari 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi ketiga terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator sasaran

Misi keempat terdiri dari 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran

Misi kelima terdiri dari 7 sasaran dengan 8 indikator sasaran

Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2018

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	115	-	-	-	-
2	Misi 2	5	2	140	3	100	-	-
3	Misi 3	5	4	116	-	-	1	72
4	Misi 4	5	1	109	-	-	4	88
5	Misi 5	8	8	150	-	-	-	-
	Jumlah	25	17	126	3	100	5	80



- Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 115%, dan sesuai target dan yang belum tercapai tidak ada.
- Capaian pada misi kedua, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui terget 2 indikator atau 140% sesuai target ada 3 indikator atau 100% dan belum mencapai target tidak ada.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui terget 4 indikator atau 116% sesuai target ada tidak ada dan belum mencapai target 1 indikator atau 72%.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui terget 1 indikator atau 109% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target 4 indikator atau 88%.
- Capaian pada misi kelima, sebanyak 8 indikator kinerja melampaui terget 8 indikator atau 150% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target tidak ada.



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Pemerintahan Kota Bukittinggi	I-2
1.3 Sejarah Singkat Kota Bukittinggi	I-6
1.4 Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	I-8
1.5 Dasar Hukum	I-20
1.6 Maksud dan Tujuan	I-22
1.7 Sistematika Penyajian	I-22
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Visi dan Misi	II-1
2.2 Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015	II-3
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	III-2
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III-4
Bab IV Penutup	
Penutup	IV-1
 Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ketentuan ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk pelaporan kinerja, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberadaan aturan ini akan mendorong percepatan mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Implementasinya diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodic. Secara teknis, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional dan daerah, sebagai laporan penerapan tahun kedua RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021. Keberadaan LKIP ini akan menjadi indikator untuk



mengukur keberhasilan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian target kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Seiring dengan penetapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi terhadap aturan ini telah menerbitkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:

a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:

- 1) Bagian Pemerintahan Umum.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Bagian Perekonomian
- 2) Bagian Pembangunan
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- 1) Bagian Organisasi
- 2) Bagian Umum dan Perlengkapan
- 3) Bagian Keuangan

2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;

3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur;

4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan;



5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Badan,
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 kelurahan
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, membawahi 8 Kelurahan



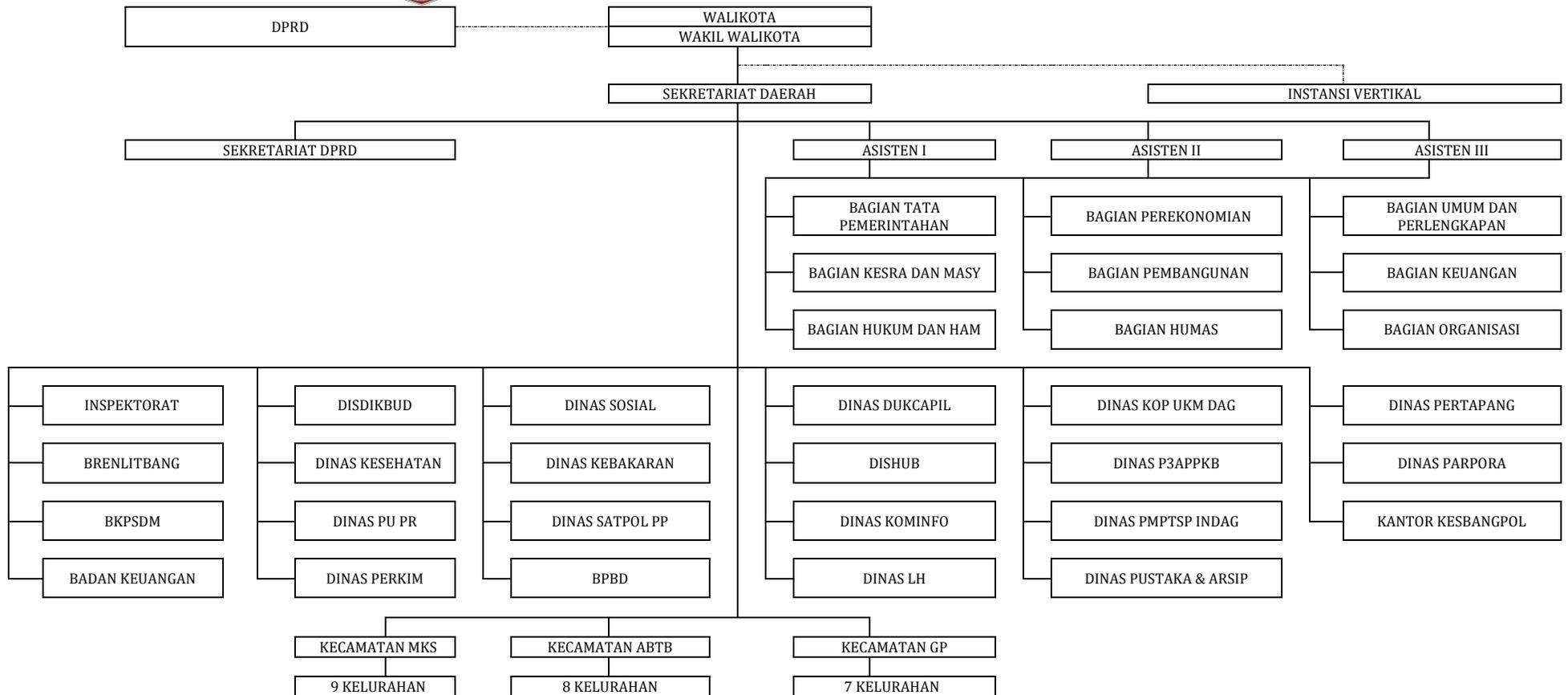
Pemerintah Kota Bukittinggi

(c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KETERANGAN

- - - - - = KOORDINASI
- = LINE DAN STAF



1.3. SEJARAH SINGKAT KOTA BUKITTINGGI.

Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa Perang Padri disalah satu bukit yang terdapat dalam kota ini, dikenal sebagai Benteng *Fort de Kock*, kemudian berkembang menjadi sebuah *Stadsgemeente* (kota), dan juga berfungsi sebagai ibukota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke 25 Kenpeitai, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dimana pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibukota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dikemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006.

1.3.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam perkembangannya Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Dearah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.

- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

1.3.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 - 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27.07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.156	48.16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24.77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS



1.4. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

1.4.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat;

Isu ini menjadi penting meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun tanangan degradasi akhlak dan moral juga semakin besar. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, AdaiK Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minagkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

1.4.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas.



Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance dan clean government. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada output dan outcomes. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi



- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi focus untuk dioptimalkan.

1.4.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representative. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

1.4.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa



penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

1.4.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.



Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daeraantara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.



1.4.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi



lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

1.4.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa, terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki - laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan



penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data Base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau eksekusi dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia



Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

1.4.8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat



terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

1.4.9. Penanggulangan Kemiskinan.



Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

a. Pengelolaan pendidikan menengah;



- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

1.5. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
- 12) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015;
- 15) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
- 16) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- 17) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017;
- 18) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017.



1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Pada bab ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Bab II *Perencanaan Kinerja*

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja, Kendala yang dihadapi dan Aspek Keuangan.

Bab IV Penutup.

Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi daerah adalah:

VISI
“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Makna yang terkandung dari visi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

2.1.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD



Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

MISI

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPd yang lama. Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2018 berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan



8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

2.2. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2		3		4
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	%	1,75
2	Terlaksanya reformasi birokrasi	3	Nilai SAKIP	nilai	BB
		4	Peringkat LPPD	peringkat	40
		5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP
		6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	75
		7	Rasio Kemandirian Keuangan daerah	%	14
3	Terpenuhinya RTH Kota	8	Persentase RTH Publik	%	14
4	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	9	Persentase fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	%	65



5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Persentase Penyediaan air minum layak	%	90
		11	Kawasan Kumuh	ha	6
		12	Persentase sanitasi layak	%	95
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	65
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	14	Pertumbuhan ekonomi	%	6,30
		15	PDRB Perkapita	jumlah	53,25 juta
		16	Indeks Gini	jumlah	<0,3
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	17	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,5
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	18	Kontribusi PAD sektor pariwisata	jumlah	533.555 orang
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	19	Harapan lama sekolah	%	14,9
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	20	Angka Rata-rata lama sekolah	%	10,85
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	21	Angka Harapan Hidup	%	72,85



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 17 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.



Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 16 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAI	%
1	2	3	4		
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1 Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	90%
2	Terlaksanya reformasi birokrasi	2 Nilai SAKIP	BB	BB	100%
3		Peringkat LPPD	40	29	137,9%
4		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
5		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
6		Rasio Kemandirian keuangan Daerah	15%	14,65%	97%



3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94	104,5%
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
		10	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73%
		11	Persentase sanitasi layak	95%	96	101%
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93%
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,20%	98%
		14	PDRB Perkapita	53,25 juta	52,50 juta	98%
		15	Indeks Gini	<0,3	<0,3	100%
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	3,5%	5,48	68%
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kontribusi PAD sektor pariwisata	533.555	577.857	108%
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan lama sekolah	14,8 tahun	14,92 tahun	100,8%
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka Rata-rata lama sekolah	78,50%	72,88	92,8%
		20	Indeks pembangunan kesehatan	70,75%	61,53	86,9%
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	21	Angka Harapan Hidup	72,75%	73,36%	100,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 21 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 12 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 93,95% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.



3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI I : MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT)

Sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD terkait. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1.1	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1.1.1	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		1.1.2	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 akan dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1.1 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN

Tujuan pertama pada misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :





SASARAN STRATEGIS 1.1.1

**Meningkatnya Dukungan Pembiayaan
Pemangku Kepentingan Dalam
Pembangunan**

Capaian sasaran strategis 1.1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,5%	1,58%	105%
Rata-rata Capaian				105%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 105%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi dan nilai capaian seperti rumus berikut ini.

1. RASIO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN BELANJA LANGSUNG APBD DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan</i>	=	<i>Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD</i> Rp. 7.071.571.909 / Rp. 446.972.085.273 (1,58%)
--	---	---

Data CSR 2018 relis april 2018



Kegiatan/ pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2017 diantaranya :

1. Melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi melalui PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan nilai Rp. 200.000.000,- dengan melakukan pembangunan wahana sepeda gantung di benteng fort de kock dan sedang dalam proses pemasangan oleh vendor telkomsel yakni PT. Alsindo Padang, dengan estimasi selesai pada pertengahan bulan Februari 2018, wahana permainan hammock di benteng fort de kock, pembuatan tema foto selfie tema (I U) di taman Panorama, Pembuatan spot foto selfie flower di panorama, dan pembuatan spot foto selfie love di panorama.
2. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai 5.433.000,- oleh PT. PLN (Persero) dengan melakukan sambungan listrik gratis di Kelurahan Pula Anak Aia, Kelurahan Manggih Gantiang dan Kelurahan Ladang Cakiah sehingga ada 3 (tiga) unit rumah yang telah dibantu.
3. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. PLN (Persero) berupa mobil unit penyapu jalan dengan harga Rp. 1.448.700.000,-.
4. Melalui Dinas Lingkungan Hidup oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berupa keranjang belanja sebanyak 10.000,- serta dari Bank Rakyat Indonesia sebanyak 200 buah, dan dari Bank Nagari sebanyak 800 buah dengan harga satuan keranjang Rp. 10.000,- dengan total Rp. 110.000.000,-
5. Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yaitu bantuan pembangunan kios penampungan pasar atas (78 petak) oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat dengan total bantuan Rp 1.500.000.000,-, oleh Yayasan Padusi Minang (21 petak) dengan nilai Rp. 239.297.646, oleh PT. Semen Padang (44 petak) dengan nilai Rp. 500.000.000,- dan PT. Bank Nagari berupa pembangunan pagar pengaman pasar atas senilai Rp. 285.830.000,- dan pembangunan kios penampungan pasar atas (80 petak) Rp. 911.610.080,-, dari Bank BRI pembangunan kios (103 petak) Rp. 1.173.697.978,-, Bank Nagari BPD (25 petak) Rp. 284.878.150,-, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumbar (25 petak) Rp. 45.580.504,-, PT. Jasa Raharja (11 petak) Rp. 125.346.386,-, dan PT. Taspen (14 petak) Rp. 159.531.764,-.



6. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh PT. PLN melalui dana untuk pendidikan senilai Rp. 6.250.000,- ke SMAN 2 Bukittinggi.
7. Melalui Ikatan Keluarga Pensiun PLN oleh PT. PLN berupa sosialisasi keagamaan senilai Rp. 75.416.401,-.

Besaran Belanja Langsung pada APBD-P Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 446.972.085.273,- dengan dana CSR senilai Rp. 7.071.571.909,- dan persentase (perbandingan dengan belanja langsung dengan APBD 2017 1,58%. Dari target yang ditetapkan telah melebihi tingkat pencapaiannya.

2.2. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD
Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	1,58%	2,5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dari awal RPJMD dengan target 1% telah terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 1,58% dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan 2,5%. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya untuk membuka peluang ba

1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan penyaluran dana CSR ini tidak luput dari dorongan dan dukungan dari pimpinan daerah, dimana segala sesuatu terkait pembangunan Kota Bukittinggi disosialisasikan ke perusahaan swasta yang ada di Kota Bukittinggi. Sehingga penyaluran dana CSR sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Bukittinggi.

1.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang paling potensial dalam indikator ini adalah sumber daya manusia dimana bagian humas dan perekonomian di sekretariat daerah kota



bukittinggi telah melakukan sosialisasi pembangunan dan surat edaran terkait pembangunan Kota Bukittinggi.

1.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program yang menunjang adalah program pengembangan potensi ekonomi, dengan target sarasannya meningkatkan dukungan informasi penyaluran CSR dari dunia usaha serta meningkatnya potensi dukungan pembiayaan pembangunan dan dunia usaha melalui kegiatan fasilitasi tim koordinasi tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP)

MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

Pencapaian misi 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, terdiri dari dua tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Terlaksananya reformasi birokrasi

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 2 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan pertama pada misi 2 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 2.1.1

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
2.	Indeks RB	B	BB	116%
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
5.	Rasio Kemandirian Keangan Daerah	15%	14,65%	97%
Rata-rata Capaian				105%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 105%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

2. Nilai SAKIP

2.1. Perbandingan Target Realisasi

Nilai SAKIP = Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BB

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 70,39 atau predikat "BB". Penilaian tersebut



Menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	BB

Uraian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, implementasi manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari komitmen pimpinan daerah bersama dengan Kepala SKPD.
2. Perencanaan kinerja secara terintegrasi maupun uraian kinerja (cascade down) telah dilakukan dari level pemerintah kota sampai dengan level eselon4, meskipun belum seluruhnya menggambarkan hubungan causalitas kinerja dengan level di atasnya, serta masih terdapat uraian kinerja yang belum sesuai dengan levelnya.
3. Kualitas indikator kinerja sudah baik, namun masih belum seluruhnya SMART dan relevan untuk menjadi alat ukur keberhasilan/ ketercapaian kinerja yang diperjanjikan.
4. Laporan kinerja, baik di level Pemda maupun OPD, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kinerja, utamanya analisis tentang program/ kegiatan yang relevan/ tidak relevan atas ketercapaian kinerja.



5. Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan sistem informasi dalam manajemen kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan monev, akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
6. Telah dilakukan analisis dan refocusing terhadap program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemda, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar Rp. 64.856.103.314 atau 22,10% dari belanja langsung setelah dikurangi belanja pegawai Rp. 293.424.543.282.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, KemenPAN RB merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan budaya kinerja tetap berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan penguatan keterlibatan pimpinan beserta jajaran secara aktif mulai dari proses perencanaan pelaporan sampai dengan evaluasi atas implementasi manajemen kinerja.
2. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan level individu, sehingga dapat terwujud keselarasan kinerja dari level organisasi sampai dengan individu.

2.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Nilai SAKIP
	Capaian Kinerja
2015	75%
2016	100%
2017	100%
2018	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari nilai SAKIP Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada tahun masing-masing yang telah berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh nilai SAKIP Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.



2.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Nilai SAKIP	C	BB	A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi nilai BB, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan nilai A ada satu tingkatan lagi untuk mendapatkan nilai SAKIP A. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam efisiensi anggaran serta perencanaan yang baik dan terintegrasi.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah dengan adanya realisasi dari pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu, intens nya koordinasi tersebut menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan cascaddown perencanaan. Dengan terukurnya perencanaan kota maka berimbas kepada efisiensi anggaran dan prioritas kegiatan sehingga terwujudnya pemerintahan yang smart.

2.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang mempengaruhi indikator nilai saki ini diantaranya sumber daya manusia, dengan dibentuknya tim saki kota bukittinggi sebagai pendamping dari SKPD dalam menyusun perencanaan sampai ke pelaporan lkip, dan juga partisipasi dari Kasubag Pencanaan yang secara intens melakukan coacing ke tim saki kota bukittinggi.

2.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan lkip Kota dan kegiatan penyusunan perencanaan dls.



3. Peringkat LPPD

3.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Peringkat LPPD</i>	=	<i>Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3,2205 dengan peringkat 29</i>
-----------------------	---	---

Berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional, memusulkan Kota Bukittinggi dengan nilai skor 3,2205 dengan status kinerja sangat tinggi dengan atribut bintang dua berada pada peringkat 29 dari 93 kota se Indonesia.

Sementara untuk hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 pada tingkat provinsi berada pada peringkat satu untuk kota se Sumatera Barat, sedangkan untuk peringkat nasional akan diumumkan pada peringatan hari otonomi daerah pada tanggal 25 April 2019 mendatang.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dengan membentuk tim penilai evaluasi kinerja mandiri penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana amanat dari PP Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan self-assessment/pemilainan sendiri terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2018 yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017
2. Melakukan interview langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya.
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan BPKP dan Biro Pemerintahan
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



5. Pelaksanaan Self Assesment (Penilaian Mandiri) yang dilaksanakan langsung oleh pihak kementerian dalam negeri sebelum pelaksanaan validasi secara resmi oleh Kemendagri (Pemerintah Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah untuk pelaksanaan self assestment).

3.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Peringkat LPPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Peringkat LPPD
	Capaian Kinerja
2015	Peringkat 65 atau 96%
2016	Peringkat 33 atau 166%
2017	Peringkat 29 atau 137%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi sejak tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan ke tahun 2016, pada tahun 2017 realisasi capaian mengalami penurunan dari 166% ke 137% namun masih berada jauh diatas target dengan peringkat 40 realisasi peringkat 29.

3.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator peringkat LPPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Peringkat LPPD	65	29	30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peringkat LPPD tahun 2018 penilaian tahun 2017 telah melebihi peringkat akhir masa RPJMD dengan peringkat 30.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.



3.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksimalkan dalam indikator ini adalah sumber daya manusia, dimana SKPD melakukan penyempurnaan terhadap indikator penilaian.

3.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Meningkatnya kualitas self asesmen laporan penyelenggaraan pemerintah melalui Penyusunan LPPD, Penunjang Penyusunan LKPJ, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) dan Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD

4. Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Daerah

4.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Opini BPK terhadap laporan daerah</i>	<i>terhadap keuangan =</i>	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK RI pada tahun 2018 WTP</i>
--	----------------------------	--

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Opini atas Laporan Keuangan (Wajar tanpa pengecualian)
2. Sistem Pengendalian Internal (masi terdapat kelemahan sistem pengendalian intern)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang kelima kalinya bagi pemerintah Kota Bukittinggi

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan :

- Dengan menyusun jadwal penyusunan LKPD Tahun 2018
- Evaluasi dan Verifikasi laporan keuangan SKPD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh SKPD sehubungan penyusunan laporan keuangan SKPD untuk meminimalisir kesalahan.

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semenjak tahun 2014. Diawali dengan LKPD tahun 2013, dan LKPD tahun 2014, yang masih ada catatan dari BPK RI. Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 terhadap LKPD Tahun 2017



merupakan WTP murni, dan penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis accrual dalam pelaporan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Kondisi LKPD ini juga menggambarkan tata kelola keuangan secara menyeluruh pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh sistem dan prosedur yang telah dibuat dan diterapkan secara konsisten dengan sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di SKPD pengelola keuangan dan seluruh SKPD yang ada.

Hal penting lain yang mendukung pencapaian WTP ini adalah pengawasan dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta pembinaan secara rutin kepada seluruh SKPD. Keberhasilan Kota Bukittinggi juga didukung dengan evaluasi dan audit dari inspektorat secara rutin dan berkala, serta pembinaan melalui klinik pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih intensif.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, aparatur pengelola keuangan dan pengawasan difasilitasi dalam bentuk bimtek/ coaching serta pelatihan, baik dengan mengutus peserta, ataupun dilakukan dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan keuangan oleh SKPD semakin meningkat, kemampuan dan keahlian aparatur pengawas juga demikian, sehingga temuan pemeriksaan yang berulang semakin menurun.

Dalam pengelolaan aset juga terjadi peningkatan penyelesaian masalah aset dan ketepatan pengelolaannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Mendukung pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi. Dengan aplikasi ini, terjadi kecepatan pengelolaan keuangan, sekaligus akurasi dan ketepatan dalam penyajiannya.

Dengan capaian WTP ini, maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.



Dibandingkan tahun 2015, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi juga sudah memperoleh WTP. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi juga memperoleh WTP terhadap LKPD tahun 2015, namun terjadi peningkatan dari sisi catatan yang sudah tidak ada lagi, serta merupakan laporan pertama menggunakan Accrual Basic sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

4.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
	Capaian Kinerja
2015	100%
2016	100%
2017	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih WTP, dengan capaian ini maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

4.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Opini BPK sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mendapatkan WTP. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan keuangan terus meningkatkan keakuratan data keuangan sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi konsisten dengan meraih WTP.



4.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara umum Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Bukittinggi. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2018 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Laporan Keuangan Tahun 2017 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2017 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2017 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.



Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016;

Terkait dengan Peraturan Walikota tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk Sosial. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi.

Aset tetap yang terdapat pada Badan Keuangan sebagai berikut:

- Tanah : 1 lokasi
- Peralatan dan mesin : 1.605 unit
- Gedung dan bangunan: 1 lokasi
- Aset tetap lainnya : 363 jenis

Total aset yang dimiliki 1.970 jenis dengan nilai Rp18.148.002.394,

4.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program kegiatan pendukung untuk menunjang indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain melalui :



- Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah Rp. 4.200.017.459,-
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-
- Program pengelolaan pengembangan pengelolaan aset daerah Rp. 2.184.062.950,-

Kegiatan Pelayanan

Badan Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

I. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan realisasi pencairan dana bantuan sosial
2. Pelayanan realisasi pencairan dana hibah
3. Pelayanan SP2D non gaji
4. Pelayanan SP2D gaji
5. Pelayanan SPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelayanan penyusunan anggaran
7. Pelayanan asistensi Rencana Kerja Anggaran

II. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Pelayanan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pelayanan pendaftaran pajak reklame
4. Pelayanan pendaftaran PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi
5. Pelayanan perforasi bill, tiket, karcis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
6. Pelayanan pembayaran pajak hotel tahun berjalan
7. Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan
8. Pelayanan pembayaran pajak hiburan tahun berjalan
9. Pelayanan pembayaran pajak reklame tahun berjalan



10. Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan
11. Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan
12. Pelayanan pembayaran piutang pajak daerah
13. Pelayanan pembayaran pajak daerah dan piutang pajak daerah (selain PBB) berdasarkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
14. Pelayanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
15. Pelayanan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

6.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik</i>	<i>=</i>	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 87,35%</i>
---	----------	--

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi meliputi :

1. Balai Benih Ikan Hias
2. Pusat Kesehatan Hewan
3. Rumah Potong Hewan
4. Puskesmas Guguk Panjang
5. Puskesmas Perkotaan
6. Puskesmas Tigo Baleh
7. Puskesmas Mandiangain
8. Puskesmas Nilam Sari
9. Puskesmas Gulai Bancah
10. Puskesmas Plus Mandiangin



11. Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh
12. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
13. Kecamatan guguk Panjang
14. Pelayanan perizinan
15. Keluarga Berencana
16. KK dan KTP
17. Catatan Sipil
18. Perhubungan
19. Pustaka
20. Pajak

Pada tahun 2018 kualitas layanan publik dilingkungan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan hasil survei pada lembaga pelayanan publik dimaksud memiliki nilai “baik” (B) dengan indeks nilai 87,35% sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksanaan
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Pada tingkat kota sembilan unsur pelayanan tersebut memiliki nilai rata-rata baik, dilihat dari lembaga penyelenggara pelayanan publik tingkat kota yang disurvei terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki rata-rata sangat baik dan tidak terdapat tingkat “cukup”.

a. Balai benih ikan hias

Capaian IKM lembaga ini adalah bernilai “baik” dengan indeks 83%, dari sembilan unsur pelayanan yang disurvei terdapat dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik dan selebihnya bernilai baik, dua unsur pelayanan tersebut adalah kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana. Hal ini didukung oleh program peningkatan kapasitas



aparatur pengelola BBIH yang dilakukan secara terprogram dan terintegrasi dengan program pendukung pada dinas pertanian dan pangan baik dengan pembiayaan dari APBD maupun yang bersumber dari Kementerian.

b. Puskesmas

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas memiliki nilai 'baik' dengan indeks 83,25, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

c. Rumah Potong Hewan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Potong Hewan memiliki nilai 'baik' dengan indeks 96,50, secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "sangat baik".

d. Puskesmas Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Guguk Panjang memiliki nilai 'baik' dengan indeks 77,46 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

e. Puskesmas Perkotaan

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Perkotaan memiliki nilai 'baik' dengan indeks 77,55 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

f. Puskesmas Tigo Baleh

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Tigo Baleh memiliki nilai 'baik' dengan indeks 74,81, ada tiga unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Produk layanan yang ada pada Puskesmas Tigo Baleh belum maksimal untuk menyelenggarakan layanan dasar wajib pada Puskesmas hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana dan hal ini terlihat pada unsur pelayanan yang juga bernilai cukup. Sarana prasarana pada Puskesmas Tigo Baleh tidak bisa ditempatkan pada ruang Puskesmas yang ada sekarang karena keterbatasan lahan



yang status kepemilikannya juga masih didalam proses penyelesaian, karena itu Puskesmas ini masih tetap dipertahankan namun pada level kualifikasi yang belum memungkinkan untuk ditingkatkan, adapun terkait penanganan pengaduan oleh masyarakat belum memadai dan akan ditingkatkan pada masa yang akan datang, layanan dasar yang selebihnya bernilai baik.

g. Puskesmas plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 79 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

h. Puskesmas Nilam Sari

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 78,80, namun ada satu unsur pelayanan yang bernilai cukup yaitu waktu pelayanan dikarenakan lokasi Puskesmas yang belum dilalui oleh angkutan umum secara rutin, hal ini menyebabkan adanya masyarakat yang dilayani datang diluar waktu pelayanan setelah Puskesmas tutup, adapun upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan waktu kunjungan masyarakat yang dilayani dan sewaktu-waktu dapat melayani masyarakat dengan menempatkan petugas secara bergiliran diluar jam layanan, unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

i. Puskesmas Gulai Bancah

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Gulai Bancah memiliki nilai 'baik" dengan indeks 80,25 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

j. Puskesmas Plus Mandiangin

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Puskesmas Plus Mandiangin memiliki nilai 'baik" dengan indeks 74,93 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

k. Kecamatan ABTB



Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan ABTB memiliki nilai 'baik" dengan indeks 88,03% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

l. Kecamatan MKS

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan MKS memiliki nilai 'baik" dengan indeks 88,5, terdapat dua unsur penilaian yang bernilai sangat baik yaitu, perilaku pelaksana dan sarana prasarana yang letak yang strategis dan luas sehingga masyarakat mudah dalam mengakses, dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

m. Kecamatan Guguk Panjang

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Guguk Panjang memiliki nilai 'baik" dengan indeks 79% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

n. Tenaga Kerja

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Tenaga Kerja memiliki nilai 'baik" dengan indeks 88,80 dan ada dua unsur pelayanan yang bernilai sangat baik yaitu perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan karena pada posisi pelayanan posisi pelayanannya telah dibantu dengan sistem yang dibuat secara nasional sehingga penanganan pengaduan langsung terkontrol oleh pusat secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

o. Penanaman Modal

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Penanaman Modal memiliki nilai 'baik" dengan indeks 80 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

p. Keluarga Berencana

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Keluarga Berencana memiliki nilai 'baik" dengan indeks 82,66 dan ada satu unsur penilaian bernilai cukup yaitu biaya dikarenakan informasi tarif masih kurang sosialisasi dan tersedia ditempat



layanan dikarenakan masih sulit untuk menentukan tarif layanan secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

q. KTP dan KK

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada KTP dan KK memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 81,28 secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

r. Catatan Sipil

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Catatan Sipil memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 84,63 tiga yang bernilai cukup yaitu waktu pelayanan, kompetensi peleksana dan penanganan pengaduan, dikarenakan smapai saat ini masih terbatas tenaga pengelola dan tahun 2018 telah mulai direkrut, dan dengan ada ketentuan dari pusat roling staf tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, permasalahan penanganan pengaduan belum dilengkapi dengan alat yang mudah untuk memfasilitasi pengaduan masyarakatada secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

s. Pustaka

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada perpustakaan memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 81% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

t. Pajak

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 78,46% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

u. Pariwisata

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai ‘baik” dengan indeks 83,25% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata “baik”.

v. Perhubungan



Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada pajak memiliki nilai 'baik" dengan indeks 86,27% secara menyeluruh dari unsur pelayanan yang di nilai memiliki nilai rata-rata "baik".

6.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik terhadap laporan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	Capaian Kinerja
2017	114,92%
2018	116%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi terus konsisten meraih Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dengan capaian ini maka dapat dilihat terjadinya peningkatan dari tahun 2017 ke Tahun 2018.

6.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	30%	87,35%	80%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sejak awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan layanan pada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.



6.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat disetiap kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dapat dirasakan dari unit pelayanan publik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan haknya.

6.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya yang mendukung dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dimaksimalkan dari sumber daya manusianya, dimana telah dilakukan bimbingan kepada SKPD layanan publik. Juga telah dikeluarkan tim Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan layanan publik.

6.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Badan Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan realisasi pencairan dana bantuan sosial
2. Pelayanan realisasi pencairan dana hibah
3. Pelayanan SP2D non gaji
4. Pelayanan SP2D gaji
5. Pelayanan SPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelayanan penyusunan anggaran
7. Pelayanan asistensi Rencana Kerja Anggaran

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Pelayanan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pelayanan pendaftaran pajak reklame
4. Pelayanan pendaftaran PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi
5. Pelayanan perforasi bill, tiket, karcis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
6. Pelayanan pembayaran pajak hotel tahun berjalan
7. Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan
8. Pelayanan pembayaran pajak hiburan tahun berjalan



9. Pelayanan pembayaran pajak reklame tahun berjalan
10. Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan
11. Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan
12. Pelayanan pembayaran piutang pajak daerah
13. Pelayanan pembayaran pajak daerah dan piutang pajak daerah (selain PBB) berdasarkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
14. Pelayanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
15. Pelayanan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah

7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

7.1. Perbandingan Target Realisasi

Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
 - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
 - d. Bantuan Keuangan



Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap APBD adalah persentase total realisasi PAD terhadap total APBD yang dibawah ini disingkat R dengan menggunakan formula dibawah ini:

$$R = \frac{PAD}{APBD}$$

Target indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun ketiga RPJMD adalah sebesar 16%, dapat direalisasikan sebesar 14,95% dengan tingkat capaian 91, 56%

Dibawah ini disajikan Realiasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	6
4.	PENDAPATAN	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56
4.2.	DANA PERIMBANGAN	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	18.049.292.620,00	12.590.206.437,00	69,75



Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	6
	Bukan Pajak			
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	66.336.887.328,00	59.565.781.339,00	89,79
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.144.038.000,00	70.593.405.768,00	85,94
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	15.995.000.000,00	-	-
	JUMLAH	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59

Pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp720.174.380.033,00, dari tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp101.936.792.226,61, maka ratio PAD terhadap APBD adalah:

$$\frac{101.936.792.226,61}{720.174.380.033,00} \times 100\% = 14,65\%$$

Dibawah ini kami sajikan anggaran dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya pada periode RPJMD 2016-2021

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018, 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi		
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	5
4.	PENDAPATAN	695.592.067.770,	695.592.067.77	653.374.887.189,	647.045.721.855,



		61	0,61	69	85
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.936.792.226,	101.936.792.22	102.375.931.332,	71.303.781.735,8
		61	6,61	69	5
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	45.131.253.075,00	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00	30.709.690.231,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00	21.070.502.562,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00	4.636.543.697,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	21.926.729.842,61	21.926.729.842,61	31.810.429.036,69	14.887.045.245,85
4.2.	DANA PERIMBANGAN	523.061.869.776,00	523.061.869.776,00	516.228.868.598,00	547.829.867.933,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.590.206.437,00	12.590.206.437,00	15.520.149.463,00	15.128.297.227,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	458.968.482.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	59.565.781.339,00	59.565.781.339,00	49.802.837.135,00	73.733.088.706,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.593.405.768,00	70.593.405.768,00	34.770.087.259,00	27.912.072.187,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	14.738.720.000,00	14.738.720.000,00	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.604.685.768,00	27.604.685.768,00	26.270.087.259,00	22.912.072.187,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	1.000.000.000,00	-
	JUMLAH	695.592.067.770,	695.592.067.77	653.374.887.189,	647.045.721.855,
		61	0,61	69	85

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar Rp6.329.165.333,84 atau sebesar 0.97%%, sedangkan



peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp42.217.180.580,92 atau sebesar 6,11%.

7.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target pendapatan asli daerah, namun demikian juga terdapat beberapa target yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Keuangan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Berikut ini beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target kinerja:

1. Pajak Hotel

Wajib pajak sering tidak melaporkan tingkat hunian hotel setiap bulannya, ketidaktepatan data pendukung dengan setoran juga menjadi kendala capaian penerimaan disamping pencatatan tingkat hunian yang masih manual. Belum optimalnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi keajibannya melaporkan dan membayar pajak juga menjadi kendala tidak tercapainya target PAD pada sektor perhotelan

2. Pajak Reklame

Sebagian rumah makan / restoran merasa keberatan diberlakukannya sistem kas register, dengan alasan tidak mempunyai karyawan yang mampu mengoperasikan kas register sehingga sulit melakukan perhitungan

3. Pajak reklame

Penerbitan dan pengeluaran izin tidak sesuai dengan zona larangan, birokrasi pengurusan izin yang terlalu panjang dan lama terutama terhadap izin yang bersifat insidental menyebabkan target tidak tercapai, disamping itu kurangnya kesadaran wajib pajak dan tidak bisanya Badan Keuangan menerbitkan SKP dan memungut pajak karena tidak adanya izin.

Konsep Penanganan Masalah

1. Melakukan intensifikasi pendataan objek pajak secara terstruktur dan sistematis
2. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran dana pajak dan retribusi
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pemberian informasi terhadap wajib pajak



- kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat menjadi sadar pajak, sehingga menghindari proses yang panjang
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan ataupun yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya
 5. Meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak reklame, termasuk pembayaran secara online.

MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mewujudkan misi 3 ini, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	3.1.1	Terpenuhinya RTH Kota
		3.1.2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan
		3.1.3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	3.2.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota

Untuk menggambarkan capaian terhadap misi 3 ini akan disajikan analisis masing-masing tujuan dan sasaran strategis berdasarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

TUJUAN 3.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN



Tujuan pertama dari misi 3 ini diukur berdasarkan indikator utama dari sasaran strategis berikut :



SASARAN STRATEGIS 3.1.1

Terpenuhinya RTH Kota

Capaian sasaran startegis 3.1.1 ini diukur berdasarkan capaian 1 (satu) indikator kinerja utama, seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
Rata-rata Capaian				7,7%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 7,7%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori gagal.

8. Persentase RTH Publik

8.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Persentase RTH Publik} = \frac{\text{Jumlah RTH publik/jumlah RTH yang tersedia}}{100} = 1,079\%$$

Sesuai Permen Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan artau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua , yaitu :



1. Ruang terbuka hijau privat , adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

2. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :

- Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi dari system sirkulasi udara (paru-paru kota)
- Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
- Sebagai peneduh
- Produsen oksigen
- Penyerap air hujan
- Penyedia habitat satwa
- Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
- Penahan angin
- Menahan kebisingan arus lalu lintas

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :

- Fungsi social dan budaya :
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - Merupakan media komunikasi warga kota
 - Tempat rekreasi
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam
 - Sebagai taman Ruang Bermain Ramah Anak
- Fungsi ekonomi :
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayor
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- Fungsi estetika :



- Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : landscape kota secara keseluruhan
- Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
- Pembentuk factor keindahan arsitektural
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- Sebagai Identitas Kota

Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati)

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah melakukan sebagian pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bukittinggi. Untuk saat ini pengelolaan ruang terbuka hijau yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah taman-taman yang termasuk fasilitas umum yang berada di Kota Bukittinggi . Taman yang pengelolaanya berada di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Taman/Lokasi Taman	Luas Tahun 2017	Luas Tahun 2018	Jenis Taman
1	Pembibitan	2.250 m ²		Tanaman biasa
2	Taman Tugu BDB, Tugu Imam Bonjol, taman depan Rumah Potong	1.269,78 m ²		Tanaman biasa
3	Taman Jl. Veteran, Simpang Tembok, Bundaran Kampung Cina	357 m ²		Tanaman biasa
4	Taman Simpang By Pass s/d Simp. Limau, Jalur	1.107,10 m ²		Tanaman biasa



	hijau Anak Air			
5	Taman gerbang Walikota, taman Dinas Walikota Gulai Bancah	6.175,90 m ²		Tanaman biasa
6	Taman Jl. Raya Walikota Gulai Bancah, taman SBY	1.108,00 m ²		Tanaman biasa
7	Sepanjang taman Jl. By Pass Gulai Bancah	3.920,00 m ²		Tanaman biasa
8	Taman Jl. Kesuma Bhakti, taman Simpang Surau Gadang	1.380,00 m ²		Tanaman biasa
9	Taman Tugu Adipura, Bundaran Simpang Mandiangin-Simpang Jl. By Pass	4.371,00 m ²		Tanaman biasa
10	Taman Simpang Limau s/d batas kota Garegeh	2.359,25 m ²		Tanaman biasa
11	Taman pendakian Luak Anyia (pendakian Bukik Ambacang), taman depan balai pemuda Luak Anyia	2.159,00 m ²		Tanaman biasa
12	Taman lereng Pasar Bawah, Bundaran Pasar Banto, taman gantung Terminal Aur Tajungkang	989,33 m ²		Tanaman biasa
13	Taman DPRD, taman depan PLN, taman bundaran depan PLN dan Gardu, taman Jl. Panorama	618,35 m ²		Tanaman biasa
14	Taman belakang dan depan Link, taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal, taman depan Kadin	1.651,49 m ²		Tanaman biasa
15	Taman Monumen Bung Hatta, taman belakang The Hills (lereng sovia), taman depan Bank Nagari	2.110,30 m ²		Tanaman biasa
16	Taman penyapuan Monumen Bung Hatta, pahlawan tak dikenal, taman depan Dinas Kadin	2.888,00 m ²		Tanaman biasa
17	Taman depan Ria Sari s/d batas kota	1.207,21 m ²		Tanaman biasa
18	Taman Tengah Jua	73,65 m ²		Tanaman biasa
19	Taman By Pass Simpang Aua s/d Taluak	1.400 m ²		Tanaman biasa
20	Taman seputan Jam Gadang, lereng Toko	5.126,00 m ²		Tanaman biasa



	Maju, bak bunga Jl. Minangkabau			
21	Taman depan Primkopol s/d Simpang Yarsi	490,15 m ²		Tanaman biasa
22	Taman Lapang Kantin, Tugu Kadet, depan Asrama Kodim	570,80 m ²		Tanaman biasa
23	Taman Belakang Balok	2.140,00 m ²		Tanaman biasa
24	Taman Ngarai Maaram	6.000 m ²		Tanaman biasa
25	Pedok	544 m ²		Tanaman biasa
26	Tanam RTH Surau Gadang	1.640 m ²		Tanaman biasa
27	Pandam	0,60 m ²		Tanaman biasa
28	Hutan Kota	0,60 m ²		Tanaman biasa
29	Taman Panganak		17,00 m ²	Tanaman biasa
Total		53.907,51 m ²	53.981,46 m ²	

Berdasarkan target SKPD, untuk luas RTH yang dikelola adalah sebesar 1,079% hal ini masih sangat jauh dari terget kota sebesar 14% dan belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi target kota adalah :

- a. Setiap kelurahan harus mempunyai taman-taman kelurahan yang nantinya akan dijadikan sebagai taman RTH Publik di Kelurahan
- b. Untuk sempadan ngarai yang tidak boleh menjadi kawasan terbangun dapat dijadikan RTH Publik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama Pemda dengan pemilik tanah (masyarakat) agar bersedia menjadikan lahan milih mereka menjadi RTH Publik.
- c. Untuk jalan-jalan utama agar disediakan median jalan yang dijadikan taman kota.

Untuk memaksimalkan fungsi taman sebagai penghasil oksigen dan estetika kota perlu dilakukan revitalisasi terhadap taman-taman yang telah ada mulai dari rehab rekonstruksi sampai dengan peremajaan tanaman yang ada di taman kota saat ini



8.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase RTH Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase RTH Publik
	Capaian Kinerja
2016	-
2017	7,2%
2018	7,7%

Berdasarkan perbandingan capaian di tahun 2016 dan 2017 terdapat kenaikan capaian di tahun 2018, belum memenuhi luas minimal RTH yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang yaitu Setiap Kabupaten/Kota harus memiliki RTH Publik 20% dan RTH privat 10% dari luas Kabupate/Kota.

8.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator persentase RTH Publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase RTH Publik	8%	1%	17%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator persentase RTH publik Kota Bukittinggi belum memenuhi target berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi tetap berupaya dalam meningkatkan RTH publik yang representatif.

9. Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan

9.1. Perbandingan Target Realisasi

Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	=	<i>Jumlah fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan/jumlah fasum = 67,94%</i>
---	---	--



- Jalan $(158,242/180,17) \times 100\% = 87,83 \%$

Jalan yang ada di Kota Bukittinggi menjadi kewenangan dari Dinas PUPR adapun kegiatan pendukung dari sub indikator ini adalah :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan Jalan Dalam kota
- Perencanaan pembangunan jalan dalam kota
- Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan dalam kota
- Pemeliharaan rutin berkala jalan dalam kota bukittinggi
- Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dalam kota tahun 2019
- Perencanaan DAK jalan 2019

- Jembatan $(28/32) \times 100\% = 87,5 \%$

Jembatan merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Kota Bukittinggi dengan kegiatan pendukung :

- Perencanaan pelebaran jembatan jalan Bahder Johan
- Pemeliharaan rutin jembatan

- Trotoar $(10/59) \times 100\% = 16,95\%$

Adapun kegiatan pada Dinas PUPR yang menjadi kewenangannya antara lain :

- Peningkatan trotoar
- Pembangunan Trotoar
- Perencanaan peningkatan trotoar tahun 2019
- Pemeliharaan rutin trotoar dalam kota

- Saluran Air $(3.652/4.596) \times 100\% = 79,46\%$

Kegiatan pendukung pada Dinas PUPR Kota Bukittinggi antara lain :

- Perencanaan pembuatan drainase dan pemasangan paving block serta trotoar
- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- Peningkatan drainase



- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
- Pembuatan bak resapan penanggulangan banjir

9.2. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	55%	67,94	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan dari awal RPJMD sampai tahun 2018 tetap mengalami kenaikan dari 55% menjadi 67,94% hingga akhir masa RPJMD diharapkan tercapai 85%.

9.3. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan ini antara lain :

- Peningkatan jalan dalam kota
- Pembangunan jalan dalam kota
- Perencanaan pembangunan dalam kota
- Rehabilitasi pembangunandan rehab jalan kota
- Perencanaan DAK jalan 2019

SASARAN STRATEGIS 3.1.3

Pemenuhan Target Universal Access (Sanitasi, Air Bersih, Dan Pemukiman Kumuh)



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.3 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92%	102%
2.	Kawasan Kumuh	6 Ha	8,2 Ha	73%
3.	Persentase Sanitasi Layak	95%	96%	101%
Rata-rata Capaian				92%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

10. Cakupan Akses Air Minum Layak

10.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Akses Air} &= \text{Persentase jumlah penduduk yang dapat} \\ \text{Minum Layak} & \text{ akses air minum layak terhadap total} \\ & \text{jumlah rumah tangga} \\ & 117.965/128.783 \times 100\% \\ & 91,5\% \end{aligned}$$



Akses penduduk untuk air minum layak sudah memadai, dengan pencapaian 92%. Di mana sarana yang dimaksud terdiri dari sumber sumur gali, PDAM dan air minum isi ulang yang kesemuanya itu sudah memenuhi persyaratan kesehatan.

Upaya yang dilakukan untuk penyediaan air bersih adalah dengan program :

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terkait dengan penyediaan air bersih adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan air bersih di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan air minum pada Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan.

2) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan ini secara khusus bertujuan untuk pengawasan sanitasi depot air minum. Seluruh Pemilik depot air Minum isi ulang yang ada di Bukittinggi selalu diberikan penyuluhan dan pelatihan. Air digunakan selalu diperiksa setiap bulannya.

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel air minum di rumah tangga untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, verifikasi kepemilikan sarana air minum. Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga termasuk penyediaan air bersih.

10.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan air minum layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Penyediaan air minum layak
	Capaian Kinerja
2016	83%
2017	103,5%
2018	102%



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan dari pencapaian penyediaan air minum layak dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun dalam tahun berikutnya akan lebih diupayakan dalam memfasilitasi penyediaan air minum layak.

10.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Penyediaan air minum layak	85%	92%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penyediaan air minum layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 92%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan Penyediaan air minum layak dengan melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kualitas air serta dengan meningkatkan distribusi air minum layak kerumah-rumah warga.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%
3	Persentase rumah sakit yang melakukan pengolahan Limbah medis sesuai standar	20 %	100 %	40%	40%
4	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan.	20 %	79.12 %	30%	39.9%
5	Persentase Tempat- Tempat Umum yang memenuhi syarat	54 %	92 %	56 %	95.18 %

minum layak ini antara lain dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum dengan indikator kinerja persentase sarana air minum masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan dengan



anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 106.316.610,-, Pembuatan sumur bor dan pengadaan dan pemasangan pipa jaringan air minum (DAK Air Minum 2018)

10.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyediaan air minum layak disediakan oleh masyarakat Kota Bukittinggi dan mendapatkan penyuluhan serta dukungan dari sektor kesehatan dan sektor lainnya yang terkait. Pengawasan terhadap sarana air minum dilakukan secara berkala oleh petugas.

10.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pengawasan dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya sanitarian puskesmas serta kader kesehatan. Anggaran yang tersedia dalam pengawasan sarana prasarana cukup memadai dimana termasuk dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum, dengan realisasi mencapai 94%.

10.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program kegiatan yang menunjang akses air minum layak terdapat pada program upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Luas Kawasan Kumuh

11.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Luas kawasan kumuh</i>	=	<i>Luas kawasan kumuh yang ditetapkan melalui keputusan Walikota berdasarkan kriteria teknis tertentu 30,6 Ha (25,239 Ha)</i>
---------------------------	---	---

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.



Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Kawasan Kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan pada akhir RPJMD tidak ada.
2. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,6 Ha dan ditargetkan 0 Ha pada akhir RPJMD.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total 30,6 Ha, yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang.

Terhadap penanganan kawasan permukiman ini sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 telah dilakukan berbagai investasi program baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi maupun Pemerintah Pusat melalui kegiatan Kolaborasi Kota Program KOTAKU. Agar luasan kawasan kumuh sesuai data diatas tidak bertambah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di kota Bukittinggi.

Tahun 2017

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2017 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP atau KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

1. Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 51.685.150,- terealisasi Rp. 29.373.600,- atau sebesar 57% anggaran yang terealisasi.
2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 96.543.875,- terealisasi Rp. 24.838.440,- atau sebesar 26% anggaran yang terealisasi.

Di tahun 2017 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan, yakni Aur Tanjungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai dan ditargetkan di tahun 2017 tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Namun capaian di akhir tahun 2017 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut (0%).



Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2017 menjadi 20,40 Ha. Namun di akhir tahun 2017 capaian belum ada, masih 30,60 Ha (0%).

Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan masih berupa pengusulan kegiatan dimana pelaksanaan kegiatannya akan direncanakan pada tahun 2018.

11.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	Kawasan Kumuh
	Capaian Kinerja
2017	45%
2018	73%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari kawasan kumuh Kota Bukittinggi telah mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan capaian 45% naik menjadi 73% [pada tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meminimalisir dari luasan kawasan kumuh, sehingga taraf hidup masyarakatpun diharapkan meningkat.

11.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator nilai SAKIP Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kawasan Kumuh	30,60	8,2 Ha	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kawasan kumuh yang ada di Kota Bukittinggi saat ini masih terdapat di dua kelurahan dengan luasan 22,4 Ha, jika dibandingkan dengan luasan awal kawasan kumuh yang ada telah terdapat pengurangan yang signifikan dari awal pelaksanaan RPJMD dengan luasan 30,60 Ha. Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan



Pemukiman terus akan melakukan pengurangan jumlah kawasan kumuh sehingga pada akhir masa RPJMD hal ini dapat diselesaikan.

11.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Indikator dari luas kawasan kumuh ini telah berhasil dilaksanakan dengan menurunnya luas kawasan kumuh di Kota Bukittinggi, hal ini dikarenakan adanya upaya Pemerintah Kota Bukittinggi berupa:

- Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh, seperti peningkatan jalan lingkung/rehab, peningkatan riol/ rehab.
- Dengan adanya program KOTAKU kawasan kumuh berkurang dari 30,6 ha menjadi 22,4 ha, salah satu programnya yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh (RP2KPKP)

11.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Program KOTAKU dibukittinggi didukung oleh 32 orang personil dengan berbagai disiplin ilmu, melalui program kerja pemberdayaan komunitas perumahan dengan kegiatan pendamping kegiatan kotaku/P2KPKP yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Dari penggunaan sumber daya keuangan KOTAKU ditunjang oleh pemberdayaan yang bersumber dari APBN dan APBD dalam bentuk dana pendamping sebesar Rp. 21.965.000 dengan realisasi 6.462.750 atau sebesar 29,42%.

11.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 ada dua kegiatan yang mendukung pelaksanaannya, yaitu Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU dan Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

Pendamping Kegiatan P2KP/KOTAKU, dengan pagu dana Rp. 21.965.000,- terealisasi Rp. 6462.750,- atau sebesar 29,42% anggaran yang terealisasi.

Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), dengan pagu dana Rp. 49.240.500,- terealisasi Rp. 35.801.312,- atau sebesar 72,71% anggaran yang terealisasi.



Di tahun 2018 kawasan kumuh dengan kondisi awal 2 (dua) kelurahan dan ditargetkan yakni Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai tidak ada lagi kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut. Luasan kawasan permukiman kumuh pada kondisi awal sebesar 30,60 Ha dan ditargetkan di tahun 2018 menjadi 10,20 Ha.

Capaian di akhir tahun 2018 masih terdapat kawasan kumuh di dua kelurahan (0%), namun luas kawasan permukiman kumuh berkurang sebesar 8,2 Ha, dari 30,60 Ha menjadi 22,4 Ha (26,8%). Di tahun 2018 juga dilakukan kegiatan pembuatan Ranperda RP2KPKP.

12. Persentase Sanitasi Layak

12.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\% \text{ sanitasi layak} = \frac{\text{Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebanyak } 123.567}{\text{Seluruh rumah tangga } 128.783} \times 100\% = 96\%$$

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program integrasi program pemerintah kota, pemerintah provinsi dan nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan



Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR.

Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan, dan pada tahun 2017 dengan target 90% terealisasi 90,05% dan pada tahun 2018 ditargetkan 95% terealisasi 96% dengan realisasi capaian kinerja 101% Kondisi ini merupakan penyesuaian terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sanitasi yang layak adalah dengan program :

1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah upaya untuk pengawasan terhadap lingkungan agar tetap memiliki sanitasi yang layak. Target utama kegiatan ini adalah mewujudkan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan kepada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan, diantaranya pemeriksaan sanitasi pasar, rumah sakit, hotel, rumah makan, sekolah, Puskesmas dan tempat umum lainnya.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas, memberikan pelayanan klinik sanitasi, membina kantin sekolah serta upaya promosi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.



12.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sanitasi Layak
	Capaian Kinerja
2016	76%
2017	100%
2018	101%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terdapat peningkatan pencapaian sanitasi layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, dan dari tahun 2017 k tahun 2018 terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja, hal ini membuktikan bahwa telah tercapainya kehidupan bersih dan sehat ditengah-tengah masyarakat sebagai wujud upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah desa / Kelurahan yg melaksanakan STBM	2	2	17	17
2	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	54 %	86.38	56%	56%
3	Persentase rumah sakit yang melakukan pengolahan Limbah medis sesuai standar	20 %	100 %	40%	40%
4	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan.	20 %	79.12 %	30%	39.9%
5	Persentase Tempat- Tempat Umum yang memenuhi syarat	54 %	92 %	56 %	95.18 %

12.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator sanitasi layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :



INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Sanitasi Layak	85%	96%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi tahun 2018 dengan realisasi 96%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan realisasi 85% ada 4% yang harus dicapai sampai akhir masa RPJMD dengan target 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah warga sehingga terjadinya peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

12.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain dengan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat, dan pembangunan toilet umum dengan anggran Rp. 906.563.700,-

TUJUAN 3.2 : PENINGKATAN PENATAAN RUANG KOTA

Tujuan kedua dari misi 3 ini didukung oleh beberapa sasaran strategis berikut:



SASARAN STRATEGIS 3.2.1
Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota

Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60,76%	93%
Rata-rata Capaian				93%

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

13. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota

13.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang kota} = \frac{\text{Ruang kota yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya } 175 \text{ Ha}}{\text{Pemanfaatan ruang kota } 288 \text{ Ha}} \times 100\% = 60,76\%$$

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya adalah salah satu implementasi dari Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Pengontrolannya dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan.

Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PU, SKPD layanan perizinan, Satpol PP dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Untuk bangunan khusus dalam kawasan yang lebih luas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan sekretariatnya di Bappeda. Badan ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah.

Pada tahun 2018, ditargetkan 65% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW,



sebelum ditetapkannya Rencana Ditail Ruang Kota. Dengan program yang ada pada Dinas PU, Bappeda dan SKPD terkait lainnya, pemanfaatan ruang kota sebanyak 60,76% sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui penggusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat sebesar 52%, dan pada tahun 2016 terealisasi 93%, pada tahun 2017 ditargetkan 60%, tahun 2018 dengan target 60% terealisasi 60,76%. Capaian kinerja ini didukung melalui upaya yang sudah disampaikan sebelumnya seperti penggusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Sejalan dengan revisi RTRW, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bappeda dan Dinas PU juga melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

Jumlah Pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan peraturan 175 Ha, Jumlah pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai aturan 288 Ha, bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang kota dan update yang dilakukan untuk menyelesaikannya :

- Pembangunan Perumahan di kawasan ngarai sianok
- Pembangunan di sempadan ngarai sianok
- Pembangunan di kawasan RTH
- Pembangunan di kawasan rel kereta api

13.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota
	Capaian Kinerja
2016	154%
2017	103,8%



2018	93%
------	-----

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2018 hal ini dikarenakan semakin tingginya target capaian dari tahun ke tahun, dalam upaya kesesuaian pemanfaatan ruang kota di Kota Bukittinggi akan terus ditingkatkan sehingga terwujudnya kesesuaian ruang kota yang representatif.

13.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang kota Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	60%	70%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang kota pada awal RPJMD dengan capaian 55% sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 60%, sampai pada akhir masa RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kota menjadi 70%.

13.4. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kesesuaian pemanfaatan ruang kota ini antara lain dengan melakukan pembuatan keterangan rancangan kota dengan anggaran Rp. 22.688.384,-

MISI IV : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

Untuk mewujudkan misi 4 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
4.2	Menurunkan Angka dan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	4.2.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis misi IV adalah sebagai berikut

TUJUAN 4.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya
Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,20%	6,04	97
2.	PDRB Perkapita	52,50 juta	54,12 juta	99
3.	Indeks Gini	<0,3	0,329	109



4.	Jumlah Investasi	30%	27%	90
Rata-rata Capaian				98,7%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 98,7%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

14. Pertumbuhan Ekonomi

14.1. Perbandingan Target Realisasi

<p><i>Pertumbuhan Ekonomi</i></p>	<p>=</p>	<p><i>Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu = 6,04%</i></p>
-----------------------------------	----------	--

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,04 persen, namun sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar 0,61 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15 persen. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sekor Tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa- jasa

Hal ini sesuai dengan potensi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata pariwisata ,perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berbenah dan memenuhi seluruh infrastruktur pendukung sektor utama kota ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dominansi sektor tersier terhadap struktur ekonomi kota.

Dibandingkan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sedikit mengalami kontraksi dari 6,12% menjadi 6,04% hal ini merupakan dampak secara nasional yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan kurang berkembangnya sektor ril sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bukittnggi dari sektor primer dan sekunder mengalami kontraksi yang lebih besar. Kenyataan ini belum sepenuhnya tertutupi oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor tersier.

Ditinjau dari besaran PDRB harga konstan maupun harga berlaku terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun 2015 PDRB harga berlaku kota bukittinggi adalah sebesar Rp 6.141.524,62 juta meningkat menjadi Rp



6.749.791,92 juta pada tahun 2016. sementara berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 adalah Rp 4.873.746,31 juta meningkat menjadi Rp 5.168.023,69 juta pada tahun 2016.

15. PDRB Perkapita

15.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>PDRB Perkapita</i>	<i>= Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha / jumlah penduduk pertengahan tahun = 58,78</i>
-----------------------	--

PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebesar Rp 58,78 juta meningkat dari Tahun 2016 yang berjumlah Rp 54,38 juta. Kondisi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi sementara pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan relatif stabil. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi adalah mengembangkan sektor-sektor potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan dan bahkan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi stabil atau malah cenderung berkurang. Hal penting lain yang sangat terkait dengan ini adalah mengendalikan inflasi walaupun realitanya pada tahun 2016 tingkat inflasi terlalu rendah, berada pada level dibawah 3%, sehingga tidak terlalu mendorong bertumbuhnya ekonomi dari sektor ril. Walaupun Kota Bukittinggi terkait hal ini tidak terlalu dirugikan karena struktur ekonominya yang didukung oleh sektor tersier namun kontribusi ekonomi luar Kota Bukittinggi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi kota secara tidak langsung berdampak, yang pada gilirannya juga akan menurunkan PDRB per kapita.

15.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita a dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	PDRB Perkapita
--	----------------



Tahun	Capaian Kinerja
2016	78%
2017	99%

16. Indeks Gini

16.1. Perbandingan Target Realisasi

<i>Indeks Gini</i>	=	<i>Distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi = 0,32</i>
--------------------	---	--

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau etimpangan distribusi pengeluaran. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain :

1. Ketimpangan Rendah ($G < 0,3$)
2. Ketipangan Sedanag ($0,3 \leq G \leq 0,5$)
3. Ketimpangan Tinggi ($G \geq 0,5$)

Jika Kooefisien bernilai 0, berarti ketimpangan sempurna.

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah sebesar 0,329, yang menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang memiliki ketipangan sedang. Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pemerataan penduduk lebih mengarah ke pemerataan sempurna dimana indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,340. Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Dilihat dari struktur ekonomi kota, dan distribusi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut, terlihat bahwa sektor informal yang banyak menyerap



tenaga kerja belum maksimal, malah sedikit berkontraksi. Hal lain juga terjadi karena sektor riil kurang berkembang, sehingga sebaran penduduk yang berusaha di sektor informal terus meningkat. Hal ini juga mendorong indeks gini sedikit bergeser ke tingkat sedang.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong Bergeraknya sektor riil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dominan menjadi usaha masyarakat.

Jumlah Investasi = Jumlah investasi yang ditanamkan di Kota Bukittinggi selama 1 tahun sebanyak 27%

Pada tahun 2017 ditargetkan pertumbuhan investasi Kota Bukittinggi sebesar 30%. Berdasarkan data dari DPMPTSP Kota Bukittinggi sampai akhir tahun 2017 penanaman modal di Bukittinggi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing adalah sebesar 1.281.juta atau dengan rincian Rp. 1.269.000.000,- dari dalam negeri dan Rp. 12.000.000,- luar negeri. Capaian ini dibandingkan dengan realisasi penanaman modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.771.juta mengalami penurunan yang signifikan sehingga terjadi penurunan sebesar 27% hal ini disebabkan beberapa permohonan penanaman modal terutama terkait pembangunan hotel dan perdagangan jasa lainnya belum dapat dituntaskan ditahun 2017 akibat keterlambatan revisi RT RW Kota Bukittinggi 2016-2021 persoalan lainnya juga terkait dengan keterbatasan lahan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh investor.

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dibiayai oleh pemerintah saja karena keterbatasan anggaran. Percepatan pembangunan kota membutuhkan dukungan pembiayaan dunia swasta melalui investasi. Mendukung masuknya investasi asing ataupun dalam negeri, pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung, regulasi yang jelas dan iklim yang mendukung investasi, serta kejelasan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Pengelolaan investasi di Bukittinggi dilaksanakan dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap BUMN/ BUMD yang ada di Kota Bukittinggi. Sementara besaran investasi masuk Bukittinggi diketahui melalui proses perizinan oleh perusahaan dalam negeri ataupun modal asing.



Data Dukung :

Kita memang selalu mengharapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bukittinggi, tapi hal itu tidak selalu mutlak dan dapat kita prediksi. Untuk masuknya investor, banyak hal yang harus kita persiapkan diantaranya Ketersediaan lahan yang sangat terbatas di Kota Bukittinggi dan Kesesuaian peruntukan lahan dengan RTRW Perbandingan masuknya investor ke Kota Bukittinggi tahun 2016 dengan tahun 2017 adalah :

- Tahun 2016 hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah mengantongi izin prinsip untuk membuka usaha di Kota Bukittinggi yaitu PT. UKAY ASIA INDONESIA dengan nilai Investasi sebesar US\$. 4.000.000,- yang bergerak di Bidang Perhotelan.
- Tahun 2017 dari PMDN hanya 1 (satu) Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu Gust House 10, dengan nilai Investasi sebesar Rp. 1.269.000.000,- yang bergerak pada Bidang usaha Penginapan, sedangkan dari PMA juga 1 (satu) Perusahaan yang sudah memiliki Izin Prinsip yaitu PT.PENGUIN FAMILY SHOES yang bergerak pada bidang usaha industry alas kaki dan industry sepatu olah raga.

Bidang/Jenis Usaha yang banyak dipilih investor adalah pada bidang perhotelan dan penginapan untuk mendukung kegiatan pada bidang kepariwisataan.

Realisasi dan Capaian Kinerja jumlah investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Investasi
	Capaian Kinerja
2016	93%
2017	90%

TUJUAN 4.2 : Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemiskinan	3,5%	5,48	68%
Rata-rata Capaian				68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 68%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **cukup**.

17. Tingkat Kemiskinan

17.1. Perbandingan Target Realisasi

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \text{Jumlah penduduk miskin} = 68\%$$

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah melalui beberapa SKPD yang terkait maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan



sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dinas Sosial menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 26 jenis PMKS dan salah satunya merupakan penduduk miskin. Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam penanganan penduduk miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial, penurunan masyarakat miskin perkotaan. Diantaranya kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat mandiri. Untuk menangani permasalahan tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial terdiri dari :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri

Realisasi indikator ini untuk tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Pada Tahun 2018, kegiatan untuk penanganan PMKS lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tahun 2017. Dari 26 PMKS yang ada 20 diantaranya telah dilakukan penanganan oleh Dinas Sosial yang dipersentasekan sekitar 76,92 %. Kegiatan Penanganan PMKS diantaranya adalah :

- ✓ Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada tahun 2017 berjumlah 954 KPM, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 1608 KPM.
- ✓ Jumlah KPM penerima Beras Sejahtera (Rastra) pada Tahun 2018 sebanyak 2.908 KPM, untuk penyaluran bulan Januari sampai dengan September 2018.
- ✓ Pada bulan Oktober penerima Rastra beralih menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kota Bukittinggi termasuk lokasi perluasan BPNT Tahap III bulan Oktober 2018 sebanyak 3.121 KPM. Penyaluran BPNT dapat dilakukan pada e-Warong, KUBe dan Agen Brilink.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga diberikan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk direnovasi, sebanyak 50 buah rumah se Kota Bukittinggi.



- ✓ Pemberdayaan terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi telah dilaksanakan untuk 100 Orang PRSE, yang diberikan keterampilan untuk membuka usaha dibidang kuliner.
- ✓ Pada Tahun 2018 juga dilakukan pembentukan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin melalui 3 (tiga) aspek yaitu Kelembagaan, Ekonomi dan sosial.
- ✓ Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir miskin yang telah terbentuk sebanyak 70 KUBe dengan anggota 10 orang masing-masing nya, sehingga anggota KUBe Fakir Miskin sebanyak 700 orang.
- ✓ Pada Tahun 2018, ditambah lagi bantuan untuk 30 KUBe FM dengan jumlah anggota sebanyak 300 orang.
- ✓ KUBe e-Warong atau KUBe Jasa dibentuk sebanyak 5 KUBe dengan jumlah anggota sebanyak 50 Orang.
- ✓ KUBe pengembangan untuk Fakir Miskin sebanyak 6 KUBe, dan pada tahun 2018 ditambah lagi 2 KUBe pengembangan dengan anggaran dari APBN.
- ✓ Untuk penyandang Disabilitas telah ditangani dengan memberi bantuan Alat Bantu Dengar sebanyak 10 orang, bantuan kursi roda 13 orang, bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 41 orang dan hibah bansos dari IPSM sebanyak 50 orang.
- ✓ Untuk kasus Orang Terlantar telah ditangani sebanyak 37 kasus selama Tahun 2018.
- ✓ Kasus Anak Bayi terlantar telah dilakukan penanganan sebanyak 4 kasus selama tahun 2018.
- ✓ Untuk Lansia telah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan sebanyak 132 Orang dan dari Hibah Bansos yang dikelola IPSM sebanyak 175 Orang.
- ✓ Untuk Korban Bencana Korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terealisasi secara maksimal (100%). Pada tahun 2018 terjadi bencana alam longsor tebing, banjir dan bencana sosial kebakaran. Masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 523 KK, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban bencana. Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2017 antara lain:
 - Korban Bencana Sosial, Kebakaran : 36 KK



- Korban Bencana Alam, Longsor Tebing : 2 KK
- Korban Bencana Alam, Banjir : 485 KK

1. Masyarakat Miskin keluar dari Basis Data Kemiskinan

Dari data kemiskinan hasil verifikasi berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat KK miskin yang telah mampu, ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November 2018 setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.154 KK.

2. PSKS yang berpartisipasi atau yang aktif menangani permasalahan kesejahteraan sosial

Pada Tahun 2018, kondisi capaian Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif melaksanakan program kesejahteraan sosial adalah 68,23 %. Pada akhir masa Renstra, diharapkan mencapai 80%. Pencapaian target ini akan dilakukan melalui Program Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru seperti Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2018 sosialisasi mengenai penumbuhan Family Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 9 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penganan PMKS Kota Bukittinggi. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana, Pada tahun 2017 telah dibentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Kayu



Kubu, Bukit Apit Puhun dan Pulau Anak Aia. Kampung siaga bencana ini termasuk bagian dari PSKS aktif menangani masalah bencana. Kampung Siaga Bencana dibentuk pada daerah yang rawan terjadi bencana, dan di daerah tersebut juga dibentuk Taruna Siaga Bencana ada masing-masing kelurahan tersebut. Untuk tingkat kota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bukittinggi, yang aktif berpartisipasi dalam penanggulangan korban pasca bencana yang berjumlah 29 orang yang merupakan utusan dari masing-masing kelurahan. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana dan Tagana ini, maka Capaian perlindungan sosial bagi korban bencana alam tahun 2018 adalah 100%.

Di Kota Bukittinggi Tahun 2018 terdapat 15 Organisasi Sosial yang aktif bergerak di bidang penanganan kesejahteraan sosial, serta terdapat 125 orang Pekerja Sosial Masyarakat yang turut menunjang pelaksanaan kegiatan sosial Dinas. Sedangkan jumlah Karang Taruna yang aktif adalah sebanyak 24 buah Karang Taruna dari 24 Karang Taruna yang telah terbentuk di Kota Bukittinggi. Selain itu, Di kota Bukittinggi terdapat 3 panti sosial yang mempunyai kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar dalam panti dan 1 Panti Sosial yang melayani Layanan Dalam dan Luar panti yaitu Panti Kasih Bundo. Dengan jumlah anak 114 orang, untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya pendidikan juga sarana dan prasarana terdapat 3 panti menerima bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Bukittinggi dan APBD Propinsi dan juga bantuan dari para donator.

17.2. Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Tingkat Kemiskinan
	Capaian Kinerja
2016	71%
2017	68%
2018	

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti



pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Dari data kemiskinan hasil verifikasi Tahun 2019 berjumlah 7.554 KK telah dilakukan verifikasi data dan terdapat 1.430 KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bulan November 2018. Dari data 1.430 KK tersebut terdapat ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2018 adalah sebesar 18,90 %. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November setelah dikurangi data yang keluar, berjumlah 6.124 KK.

17.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Tingkat kemiskinan	4,23	5,48	2,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018 dibandingkan dengan awal RPJMD masih jauh meningkat, hal ini menjadi tugas bersama pemerintah dan msayarakat untuk sama-sama dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
5.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5.1.1	Meningkatkan pelayanan pariwisata
5.2	Layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter unggul	5.2.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
		5.2.2	Meningkatkan kualitas pendidikan
5.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.3.1	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
		5.3.2	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan
5.4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa	5.4.1	Terjaganya stabilitas harga
5.5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi	5.5.1	Terkendalinya jumlah penduduk

Analisis capaian kinerjanya dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama per sasaran strategis sebagai berikut:

TUJUAN 5.1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN

Pencapaian tujuan pertama pada misi 5 ini akan dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja utama beberapa sasaran strategis berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.1.1

**MENINGKATKAN
PELAYANAN
PARIWISATA**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kontribusi PAD sektor pariwisata	460.905	35%	
Rata-rata Capaian				108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 108%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

18. Kontribusi PAD sektor pariwisata

18.1. Perbandingan Target Realisasi

Kontribusi PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD Kota/ Realisasi PAD sektor pariwisata} \times 100\%}{101.936.792.226 \times 100\%}$
	$= \frac{36.463.494.823}{101.936.792.226 \times 100\%}$
	35%

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,239 km², dengan wilayah administrasi terbagi atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Topografi bergelombang, terdiri dari bukit-bukit dan lembah-lembah. Dimana bila kita menyusuri Kota Bukittinggi maka akan banyak sekali jalan yang mendaki, menurun dan jenjang untuk pejalan kaki, maka tidak salah kota ini dijuluki kota seribu jenjang. Dengan keindahan alam dan hawa sejuk karena dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Singgalang dan Tandikek atau disebut juga Tri Arga seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah seperti, Lobang Jepang, Benteng Fort de Kock, Jam Gadang dan lain- lain. Karunia alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota tujuan utama wisata di Sumatera Barat.

Di Kota Bukittinggi sektor pariwisata merupakan sektor terpenting yang memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Anggaran Daerah Kota Bukittinggi. Pendapatan ini berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, restoran dan lain-lain.



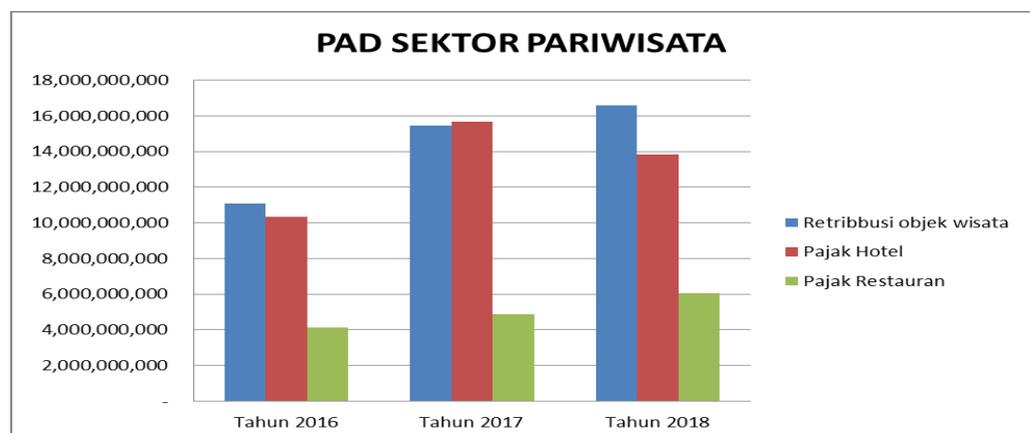
Untuk pendapatan pariwisata dari sektor retribusi rekreasi dan olahraga mengalami kemajuan yang cukup baik dari tahun ke tahun, hasil ini juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan destinasi dan industry wisata yang meliputi konsep 4A Atraksi (objek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati, yang layak 'dijual' ke pasar wisata) Amenitas (Segala macam fasilitas penunjang kegiatan pariwisata) Aksesibilitas (Sarana prasarana yang tersedia untuk membantu wisatawan mencapai objek wisata dengan aman dan nyaman) dan Ancillary (organisasi atau orang - orang yang mengurus objek wisata).

PAD sektor pariwisata meliputi retribusi objek wisata dan retribusi sarana olah raga berdasarkan Perwako Nomor 5 Tahun 2017, dengan target anggaran sebesar Rp. 16.366.609.445,- relisasi target sebesar Rp. 16.603.534.121,- dengan capaian 101,45%.

Berikut disajikan data PAD sektor pariwisata, kunjungan wisatawan ke objek wisata berbayar dan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel.

PAD sektor pariwisata

Sumber pendapatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Retribusi objek wisata	11.086.016.000 ,-	15.449.660.182 ,-	16.603.534.121,-
Pajak hotel	10.332.160.754 ,-	15.677.584.723 ,-	13.819.121.537,-
Pajak restoran	4.131.293.409,-	4.883.019.955,-	6.040.839.165,-



Keterangan :

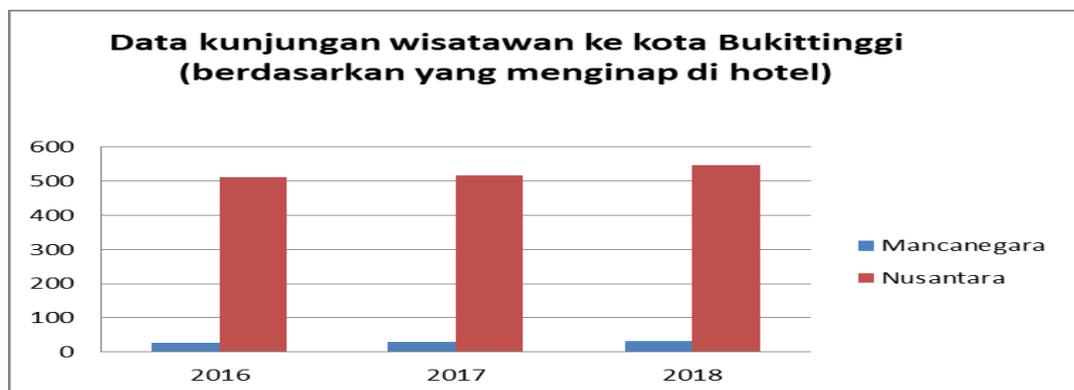


Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 2 sektor pariwisata, baik itu retribusi objek wisata dan pajak restoran selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, untuk retribusi objek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2017 mengalami kenaikan cukup significant sebesar 39%, dan untuk tahun 2018 naik lagi sebesar 7%.

Untuk pajak hotel tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 51% dan pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan sebesar 11%, sementara pajak restoran pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 23%.

**Data kunjungan wisatawan ke kota Bukittinggi
(berdasarkan yang menginap di hotel)**

Tahun	Jenis wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Nusantara	
2016	27.516	511.258	538.774
2017	30.412	516.483	546.895
2018	31.841	546.016	577.857



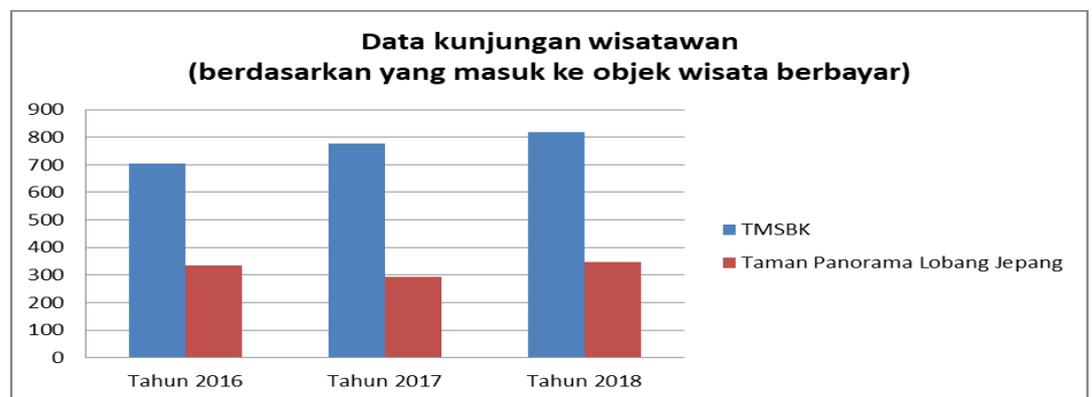
Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data tamu yang menginap di hotel baik itu jenis wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan cukup bagus. Tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara naik 10% dan 2018 naik lagi sebesar 3%. Untuk wisatawan nusantara tahun 2017 naik sebesar 1% dan tahun 2018 naik lagi sekitar 5%.



**Data kunjungan wisatawan
(berdasarkan yang masuk ke objek wisata berbayar)**

Objek wisata	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
TMSBK	703.718	777.403	818.839
Taman Panorama Lobang Jepang	333.474	293.742	345.905
Total	1.037.192	1.071.145	1.164.294



Keterangan :

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data pengunjung ke objek wisata berbayar Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk tahun 2017 terjadi kenaikan sekitar 10% dibanding tahun 2016. Untuk tahun 2018 meningkat lagi sekitar 5%.

Sementara jumlah pengunjung ke objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang masih berfluktuasi dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 11% dan tahun 2018 naik sebesar 17%.

Kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi terbagi atas dua kelompok yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara masuk objek wisata
Dari target 1.092.353 orang dengan realisasi 1.164.294 orang (sumber Disarpورا) dengan kegiatan pendukung diantaranya
 - Pemeliharaan jam gadang
 - Pengelolaan taman panorama lobang jepang
 - Pemeliharaan objek wisata



- Pemeliharaan TMS-BK
- Revitalisasi kawasan wisata taman marga satwa dan budaya jinantan
- Revitalisasi kawasan wisata taman panorama

2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menginap di hotel

Dari target 557.832 orang dengan realisasi 577.857 orang (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif), kegiatan pendukung diantaranya :

- Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri
- Pembuatan dan pengadaan sarana promosi pariwisata

3. Rata-rata lama tinggal wisatawan

Dari target 2 hari dan realisasi 2 hari (data rekap statistik kunjungan hotel pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif) dengan kegiatan pendukung :

- Dukungan terhadap pelaksanaan tur de singkarak
- Lomba fotografi wisata tingkat provinsi dan cipta lagu pariwisata
- Fasilitasi iven-iven pariwisata
- Pembinaan guide
- Fasilitasi penampilan tim kesenian
- Pembinaan sadar wisata
- Pemilihan duta wisata kota bukittinggi
- Festival Multi etnis

18.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Capaian Kinerja
2016	103%
2017	103,89%
2018	108%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan layanan terhadap wisatawan sebagai wujud Kota Bukittinggi sebagai kota wisata.

18.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator kunjungan wisatawan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Kunjungan Wisatawan	460.905 orang	577.857 orang	588.245 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari awal tahun RPJMD dengan jumlah kunjungan 406.905 dan meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah kunjungan 577.857 orang. Pemerintah Kota Bukittinggi terus mendorong kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Serta meningkatkan promosi Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kunjungan wisatawan ini antara lain, Pemeliharaan Jam Gadang, Pengelolaan Taman Panorama Lobang japing, Pemeliharaan Obyek Wisata, Pemeliharaan TMS-BK, Revitalisasi Kawasan Wisata Tamam Marga Satwa dan Budaya kinantan (DAK Fisik Pariwisata 2018), Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Panorama (DAK Fisik Pariwisata 2018), Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri, Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata, Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata, Fasilitasi Iven-ivent Pariwisata, Pembinaan Guide, Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian, Pembinaan Sadar Wisata, Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi, Festival Multi Etnis.

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Kontribusi PAD sektor pariwisata sangat berhasil, hal ini disebabkan adanya peran serta stakeholder dan SKPD terkait dalam menunjang urusan kepariwisataan. Melakukan promosi melalui web mengikuti promosi dalam dan luar negeri. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata seperti jalan, lalu lintas lancar, keamanan dan kenyamanan wisatawan terjamin.

18.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata perlu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap ujung tombak pariwisata seperti, juru parkir, kusir bendi, fotografer, pemandu wisata, sopir angkot serta pedagang sovenir di tempat-tempat wisata, berupa pelatihan dan pengembangan diri agar melakukan pelayanan prima terhadap wisatawan. Tidak lupa menerapkan sapta pesona dalam kehidupan sehari-hari.

18.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program penunjang :

- Program pengembangan pemasaran pariwisata
- Program pengembangan destinasi pariwisata

TUJUAN 5.2 : LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER UNGGUL

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



**SASARAN STRATEGIS 5.2.1
MENINGKATNYA AKSES
LAYANAN BIDANG
PENDIDIKAN**



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan lama sekolah	14,8 tahun	14,92 tahun	100,8%
Rata-rata Capaian				100,8%

Data BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**

19. Harapan lama sekolah

19.1.Perbandingan Target Realisasi

Harapan Lama Sekolah = Lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak umu tertentu pada masa datang 14,92 tahun

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79% Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

- 1.Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah
- 2.SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah



3.SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah

4.Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sementara untuk jaringan pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini dalam bentuk fasilitasi.

Angka Harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 14,92 tahun, dan tahun 2016 selama 14,92 tahun. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya, karena belum ada publikasi terbaru data harapan lama sekolah yang dipublikasi oleh BPS Kota Bukittinggi, walaupun data sementara terdapat peningkatan. Sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, data yang menjadi ukuran adalah dari BPS Kota Bukittinggi.

19.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Harapan Lama Sekolah
	Capaian Kinerja
2016	79%
2017	100%
2018	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan minat sekolah pada anak-anak usia sekolah.

19.3. Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator harapan lama sekolah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Harapan lama sekolah	14,7	14,92	15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2018 jika disandingkan dengan data awal tahun RPJMD mengalami kenaikan dari 14,7 menjadi 14,92, dan untuk akhir masa RPJMD akan ditingkatkan menjadi 15.



SASARAN STRATEGIS 5.2.2
MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	78,50%	72,88%	92,8%
2.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	70,75%	61,53%	86,9%
Rata-rata Capaian				89,85%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 89,85%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

20. Angka Rata-rata Lama Sekolah

20.1. Perbandingan Target Realisasi

Indeks pembangunan masyarakat dilakukan dengan pencapaian indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PISPK), yang terdiri dari 12 indikator keluarga sehat.

20.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan tahun Sebelumnya

Tahun	Capaian Kinerja
	79%
2016	
2017	10% 12%
2018	12% 14%

20.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Upaya pencapaian indeks pembangunan kesehatan melalui pendekatan PISPK yang dilaksanakan sejak tahun 2017, dengan sasaran seluruh keluarga yang ada di Kota Bukittinggi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan disamping pendataan keluarga sehat juga dilakukan pemberdayaan keluarga sehat.

20.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Seluruh tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mendukung tercapainya indeks pembangunan kesehatan dengan pencapaian keluarga sehat, baik yang ada di Puskesmas maupun di Dinas kesehatan serta lintas sektor yang terkait. Untuk pembiayaan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN.

20.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program upaya kesehatan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan program promosi kesehatan.



Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SD

$$\text{Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 43}}{\text{Jumlah sekolah SD 59}} \times 100\% = 72,88\%$$

Bukittinggi memiliki 59 sekolah dasar. Sebanyak 59 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2017 sebanyak 43 sekolah memperoleh akreditasi A, 13 sekolah terakreditasi B dan 3 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 108%, dimana target yang ditetapkan sebesar 72,88 % dan terealisasi sebesar 79%.

Untuk mendapatkan akreditasi A, fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang mencapai indikator standar penilaian yang telah dilakukan oleh BAN pusat, baik dari segi mutu dan layanan pendidikan

Penilaian akreditasi sekolah ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap indikator yang telah ditetapkan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sesuai peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2015 Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 71,18%, dan tahun 2016 menjadi 79%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SD yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

Dari semua SD yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat satu sekolah mendapat nilai akreditasi C dan 13 sekolah yang mendapat nilai B



sedangkan A ada 43 sekolah perhitungannya adalah 43 dibagi 57 dikali 100 % jumlahnya 75,44. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	SD	NEGERI	A	92	2022
2	SDN 01 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	93	2020
3	SDN 01 LADANG CAKIAH	SD	NEGERI	A	91	2020
4	SDN 02 AUR KUNING	SD	NEGERI	A	87	2020
5	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	91	2021
6	SDN 02 PERCONTOHAN	SD	NEGERI	A	93	2022
7	SDN 03 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	92	2019
8	SDN 03 PAKAN LABUAH	SD	NEGERI	A	91	2022
9	SDN 03 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
10	SDN 04 BIRUGO	SD	NEGERI	A	93	2022
11	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	90	2021
12	SDN 04 GAREGEH	SD	NEGERI	A	95	2022
13	SDN 05 BIRUGO	SD	NEGERI	A	87	2020
14	SDN 05 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	94	2021
15	SDN 05 TAROK DIPO	SD	NEGERI	B	89	2022
16	SDN 06 ATTS	SD	NEGERI	A	94	2021
17	SDN 06 PARIT ANTANG	SD	NEGERI	A	94	2020
18	SDN 06 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	A	93	2021
19	SDN 07 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	93	2022
20	SDN 07 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	94	2021
21	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	A	95	2021
22	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	SD	NEGERI	B	89	2022
23	SDN 08 KUBU TANJUANG	SD	NEGERI	B	82	2020
24	SDN 08 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2022



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
25	SDN 09 BELAKANG BALOK	SD	NEGERI	A	94	2020
26	SDN 09 MANGGIS GANTIANG	SD	NEGERI	A	92	2022
27	SDN 10 ATTS	SD	NEGERI	A	92	2016
28	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	A	92	2020
29	SDN 10 SAPIRAN	SD	NEGERI	A	95	2021
30	SDN 11 AUR KUNUNG	SD	NEGERI	A	94	2021
31	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	93	2020
32	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	A	93	2019
33	SDN 12 BUKIT CANGANG	SD	NEGERI	A	93	2021
34	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	SD	NEGERI	B	90	2022
35	SDN 13 BUKIT APIT PUHUN	SD	NEGERI	A	92	2020
36	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	SD	NEGERI	B	88	2022
37	SDN 14 ATTS	SD	NEGERI	A	91	2018
38	SDN 14 TANJUNG ALAM	SD	NEGERI	B	87	2022
39	SDN 15 PULAI ANAK AIR	SD	NEGERI	B	84	2019
40	SDN 16 CAMPAGO IPUH	SD	NEGERI	A	92	2022
41	SDN 16 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	92	2020
42	SDN 17 MANGGIS GANTING	SD	NEGERI	B	90	2022
43	SDN 17 PAKAN KURAI	SD	NEGERI	A	91	2020
44	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	SD	NEGERI	B	83	2022
45	SDN 18 TAROK DIPO	SD	NEGERI	A	93	2019
46	SDN 19 ATTS	SD	NEGERI	A	90	2021
47	SD AL AZHAR	SD	SWASTA	A	93	2020
48	SD AL FALAH	SD	SWASTA	A	91	2022
49	SD AL ISHLAH	SD	SWASTA	A	91	2020



NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
50	SD CAHAYA HATI	SD	SWASTA	B	90	2022
51	SD EXCELLENT	SD	SWASTA	A	91	2022
52	SD FRANSISKUS	SD	SWASTA	A	90	2020
53	SD INSAN KAMIL	SD	SWASTA	B	89	2022
54	SD JAMIYYATUL HUJAJ	SD	SWASTA	A	94	2021
55	SD MASYITHAH	SD	SWASTA	B	89	2020
56	SD SYAHIRAL ILMI	SD	SWASTA	B	83	2018
57	SD TRISULA PERWARI	SD	SWASTA	C	58	2021

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD
	Capaian Kinerja
2016	108%
2017	100,2%
2018	92,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A	72,88%	72,88%	81,35%



Tingkat SD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SD Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 72,88% tidak terjadi peningkatan, untuk mencapai tingkatan akhir masa RPJMD dengan 81,35% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar.

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 8}}{\text{Jumlah sekolah SMP 13}} \times 100\% = 61,53\%$$

Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Bukittinggi adalah 13. Sebanyak 13 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2018 sebanyak 8 sekolah memperoleh akreditasi A, 3 sekolah terakreditasi B dan 2 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 135 %, dimana target yang ditetapkan sebesar 54 % dan terealisasi sebesar 73%.

Pada tahun 2015 Persentase SMP yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 54,50%, dan tahun 2016 menjadi 73%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMP yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS	PERINGKAT	NILAI	MASA BERLAKU
1	SMPN 1 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2019
2	SMPN 2 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	90	2020
3	SMPN 3 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
4	SMPN 4 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020
5	SMPN 5 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	92	2020



6	SMPN 6 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	85	2020
7	SMPN 7 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	B	83	2019
8	SMPN 8 BUKITTINGGI	SMP	NEGERI	A	86	2020
9	SMP AL ISHLAH	SMP	SWAST A	A	90	2021
10	SMP PSM	SMP	SWAST A	B	81	2021
11	SMP XAVERIUS	SMP	SWAST A	A	87	2021

Dari semua SMP yang ada di Kota Bukittinggi Negeri dan Swasta, terdapat tiga sekolah mendapat nilai akreditasi B sedangkan A ada 8 sekolah perhitungannya adalah 8 dibagi 11 dikali 100 % jumlahnya 72,73. Ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP
	Capaian Kinerja
2016	135%
2017	111%
2018	86,9%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan realisasi capaiannya, hal ini dikarenakan tingginya target yang harus dipenuhi pada tiap-tiap tahun berikutnya. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap sekolah dalam memberikan akreditasi, sehingga diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

Realisasi capaian indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan terget akhir RPJMD :

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP	54,50%	61,53%	90,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP Kota Bukittinggi tahun 2018 jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 54,50% terjadi peningkatan, untuk mencapai target akhir masa RPJMD dengan 90,90% Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Adapun kegiatan pendukung dari indikator Persentase Sekolah yang Berakreditasi A Tingkat SMP ini antara lain :

TUJUAN 5.3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan ketiga pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.3.1

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	72,56%	73,36%	100,8%
Rata-rata Capaian Indikator				100,8%



BPS relis april 2018

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

22. Angka Harapan Hidup

22.1. Perbandingan Target Realisasi

Angka Harapan Hidup	=	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur 73,69
---------------------	---	---

Salah satu indikator utama untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Indikator ini menjadi salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Pada tahun 2018 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 72,75 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 73,13 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti; tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.

Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 71,98 tahun, dan tahun 2016 meningkat menjadi 73,36 tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan kuratif serta perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin baik.

22.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tahun	Angka Harapan Hidup
	Capaian Kinerja
2016	101%
2017	100,8%
2018	

22.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Angka harapan hidup merupakan indikator dari tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka sasaran strategis dari dinas kesehatan mengacu pada pencapaian indikator meningkatnya harapan lama hidup. Sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dan meningkatnya mutu kesehatan masyarakat, dengan memfokuskan program dan kegiatan penunjang indikator dimaksud.

22.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan terdiri dari tenaga medis dan tenaga paramedis yang ada baik di dinas maupun Puskesmas.

Dari segi pembiayaan penyediaan anggaran serta penempatannya berorientasi pada pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

22.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya angka harapan hidup adalah :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya Kesehatan masyarakat adalah program untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) didalam gedung dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di luar gedung. Upaya Kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada 7 Puskesmas yang ada, pelayanan kesehatan P3K pada keramaian Kota, pelayanan ambulance siaga yang siap antar jemput pasien dari rumah menuju sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberlakukan pengobatan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi yang ditandai dengan KTP / Kartu Keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga



miskin sebanyak 9.618 orang, artinya seluruh warga Kota Bukittinggi sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Akses kesehatan yang sudah baik di Kota Bukittinggi ditunjang oleh adanya 7 Puskesmas induk pada setiap Kecamatan di Kota Bukittinggi. Dari 3 Kecamatan yang ada, 1 Puskesmas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 Puskesmas di Kecamatan Guguk Panjang dan 4 Puskesmas di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga dilengkapi dengan 14 Puskesmas Pembantu dan 26 Pos Kesehatan Kelurahan yang sudah ada pada setiap Kelurahan. Di Kota Bukittinggi terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 115 Praktek dokter perorangan, 45 apotek dan pendukung lainnya. Untuk mobilisasi program kesehatan, pada 7 Puskesmas juga sudah ada Mobil Puskesmas keliling.

2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar
- b. Memberikan pelayanan ibu bersalin sesuai standar
- c. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- d. Memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- e. Memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Dalam hal mengatasi permasalahan gizi diantaranya masalah Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Stunting (anak pendek), kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA) dan mengatasi masalah Kurang Energi Kalori pada Ibu Hamil. Untuk meningkatkan status gizi masyarakat sudah dilakukan upaya pemberian makanan tambahan pada anak sekolah, pemberian makanan tambahan pada anak keluarga miskin, makanan tambahan pada anak baru masuk sekolah, makanan tambahan pada ibu hamil KEK, makanan tambahan pada balita KEP.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk menunjang seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan



khususnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program promosi ini berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Berupa penyuluhan melalui media, pemasangan baliho, running text, pemasangan stiker, penancangan program dan kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi masyarakat dan kader-kader kesehatan.

Sebagai ujung tombak dari upaya promosi kesehatan, pada setiap Kelurahan sudah ada Posyandu sebanyak 133 Posyandu, kader-kader kesehatan, kader Pos kesehatan Kelurahan sebanyak 33 buah dan PKK kelurahan yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan usia lanjut sehingga dapat mandiri dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan prioritas pada lanjut usia di Puskesmas, mengaktifkan Posyandu Lansia sebagai wadah dalam menggerakkan Lansia untuk menjaga kesehatannya, melaksanakan senam lansia rutin setiap minggu pada setiap Puskesmas.



SASARAN STRATEGIS 5.3.2

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	72,75%	73,36%	100,8%
Rata-rata Capaian Indikator				



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100,8%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

21. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup	=	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur 73,36 tahun
----------------------------	----------	--

Salah satu indikator utama untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Indikator ini menjadi salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Pada tahun 2016 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 72,36 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 73,13 tahun dan menjadi salah satu variabelr Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti; tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.

Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 71,98 tahun, dan tahun 2016 meningkat menjadi 73,36 tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan kuratif serta perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin baik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya angka harapan hidup adalah :

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya Kesehatan masyarakat adalah program untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) didalam gedung dan Upaya



Kesehatan Masyarakat (UKM) di luar gedung. Upaya Kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada 7 Puskesmas yang ada, pelayanan kesehatan P3K pada keramaian Kota, pelayanan ambulance siaga yang siap antar jemput pasien dari rumah menuju sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberlakukan pengobatan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi yang ditandai dengan KTP / Kartu Keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin sebanyak 9.618 orang, artinya seluruh warga Kota Bukittinggi sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Akses kesehatan yang sudah baik di Kota Bukittinggi ditunjang oleh adanya 7 Puskesmas induk pada setiap Kecamatan di Kota Bukittinggi. Dari 3 Kecamatan yang ada, 1 Puskesmas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 Puskesmas di Kecamatan Guguk Panjang dan 4 Puskesmas di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga dilengkapi dengan 14 Puskesmas Pembantu dan 26 Pos Kesehatan Kelurahan yang sudah ada pada setiap Kelurahan. Di Kota Bukittinggi terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 115 Praktek dokter perorangan, 45 apotek dan pendukung lainnya. Untuk mobilisasi program kesehatan, pada 7 Puskesmas juga sudah ada Mobil Puskesmas keliling.

7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- f. Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar
- g. Memberikan pelayanan ibu bersalin sesuai standar
- h. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- i. Memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- j. Memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)

8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Dalam hal mengatasi permasalahan gizi diantaranya masalah Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Stunting (anak pendek), kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan



Vitamin A (KVA) dan mengatasi masalah Kurang Energi Kalori pada Ibu Hamil. Untuk meningkatkan status gizi masyarakat sudah dilakukan upaya pemberian makanan tambahan pada anak sekolah, pemberian makanan tambahan pada anak keluarga miskin, makanan tambahan pada anak baru masuk sekolah, makanan tambahan pada ibu hamil KEK, makanan tambahan pada balita KEP.

9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk menunjang seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan khususnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program promosi ini berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Berupa penyuluhan melalui media, pemasangan baliho, running text, pemasangan stiker, pencaanangan program dan kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi masyarakat dan kader-kader kesehatan.

Sebagai ujung tombak dari upaya promosi kesehatan, pada setiap Kelurahan sudah ada Posyandu sebanyak 133 Posyandu, kader-kader kesehatan, kader Pos kesehatan Kelurahan sebanyak 33 buah dan PKK kelurahan yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan usia lanjut sehingga dapat mandiri dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan prioritas pada lanjut usia di Puskesmas, mengaktifkan Posyandu Lansia sebagai wadah dalam menggerakkan Lansia untuk menjaga kesehatannya, melaksanakan senam lansia rutin setiap minggu pada setiap Puskesmas.

Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Angka Harapan Hidup
	Capaian Kinerja
2016	101%
2017	100,8%



3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018, tercantum pada tabel dibawah ini :

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	6
4.	PENDAPATAN	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.738.280.085,00	101.936.792.226,61	99,22
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	95,88
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	38.216.489.567,00	29.942.903.285,00	78,35
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.005.034.528,00	21.926.729.842,61	156,56
4.2.	DANA PERIMBANGAN	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.049.292.620,00	12.590.206.437,00	69,75
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	66.336.887.328,00	59.565.781.339,00	89,79
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.144.038.000,00	70.593.405.768,00	85,94



Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	6
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.738.720.000,00	98,17
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	15.995.000.000,00	-	-
	JUMLAH	720.174.380.033,00	695.592.067.770,61	96,59

Pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp720.174.380.033,00, dari tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp101.936.792.226,61, maka ratio PAD terhadap APBD adalah:

$$\frac{101.936.792.226,61}{720.174.380.033,00} \times 100\% = 14,65\%$$

Dibawah ini kami sajikan anggaran dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya pada periode RPJMD 2016-2021

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018, 2017 dan 2016

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi		
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	5
4.	PENDAPATAN	695.592.067.770,61	695.592.067.770,61	653.374.887.189,69	647.045.721.855,85
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.936.792.226,61	101.936.792.226,61	102.375.931.332,69	71.303.781.735,85
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	45.131.253.075,00	45.131.253.075,00	38.282.140.327,00	30.709.690.231,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	29.942.903.285,00	27.329.451.324,00	21.070.502.562,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan	4.935.906.024,00	4.935.906.024,00	4.953.910.645,00	4.636.543.697,00



	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	21.926.729.842,61	21.926.729.842,61	31.810.429.036,69	14.887.045.245,85
4.2.	DANA PERIMBANGAN	523.061.869.776,00	523.061.869.776,00	516.228.868.598,00	547.829.867.933,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.590.206.437,00	12.590.206.437,00	15.520.149.463,00	15.128.297.227,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	458.968.482.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	59.565.781.339,00	59.565.781.339,00	49.802.837.135,00	73.733.088.706,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.593.405.768,00	70.593.405.768,00	34.770.087.259,00	27.912.072.187,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	14.738.720.000,00	14.738.720.000,00	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.604.685.768,00	27.604.685.768,00	26.270.087.259,00	22.912.072.187,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	1.000.000.000,00	-
	JUMLAH	695.592.067.770,61	695.592.067.770,61	653.374.887.189,69	647.045.721.855,85

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar Rp6.329.165.333,84 atau sebesar 0,97%, sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp42.217.180.580,92 atau sebesar 6,11%.

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA ANALISIS CAPAIAN LKIP

Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan diatas terdapat peningkatan capaian kinerja sasaran Kota Bukittinggi dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terutama pada peringkat LPPD, RTH publik, persentase air minum layak terjadi peningkatan yang signifikan hingga 70%.



Berdasarkan hal tersebut laporan kinerja instansi pemerintah dijadikan sebagai acuan untuk mempertajam indikator dan target daerah untuk dibahas dalam musrenbang tingkat kota dan ditindaklanjuti pada Renja SKPD terkait. Terhadap Indikator Kinerja yang menjadi prioritas kota digunakan hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan LKIP, untuk merasionalkan penetapan pagu anggaran tidak hanya berorientasi pada SKPD melainkan kepada pencapaian tingkat sasaran bahkan indikator sasaran tingkat kota. Pencapaian kinerja yang disebabkan oleh kelalaian SKPD ataupun kesalahan analisis pada tingkat TAPD di lakukan evaluasi, bahkan merupakan salah satu pertimbangan untuk memberikan *reward and punishment* terutama dukungan anggaran yang bersifat operasional dan belanja pegawai.



BAB IV PENUTUP

Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang termuat dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2018-2021 merupakan tanggung jawab seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang telah dituangkan pada Renstra masing-masing SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam suatu penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang memuat sasaran strategis dan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya. LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi pada hakekatnya merupakan hasil dari pencapaian kinerja SKPD dalam mencapai sasaran berdasarkan program dan kegiatan pendukungnya yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2018 umumnya dapat dicapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat diwujudkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran strategis dan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja.

Capaian kinerja yang belum atau kurang memenuhi target disebabkan antara lain kurang sesuainya data yang tersedia dibandingkan dengan data yang dibutuhkan dalam indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perubahan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja sasaran umumnya berkaitan dengan persoalan kebijakan teknis dari pemerintah, keterbatasan sumber dana dan SDM serta hal lainnya diluar perkiraan sebelumnya.

Untuk masa yang akan datang perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain : meningkatkan koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan wawasan dan SDM aparatur melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan maupun dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.



Pemerintah Kota Bukittinggi

Kita berharap dengan semakin lengkapnya data yang tersedia dan semakin pahamnya aparaturnya terhadap aturan, kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi pemerintah dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Bukittinggi, Maret 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS



HASIL PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISAI	%
1	2		3	4		
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1,75%	1,58%	90%
2	Terlaksana reformasi birokrasi	2	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		3	Peringkat LPPD	40	29	137,9 %
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	87,35%	116%
		6	Rasio Kemandirian keuangan Daerah	15%	14,65%	97%
3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH Publik	14%	1,079%	7,7%
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	65%	67,94	104,5 %
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Persentase Penyediaan air minum layak	90%	92	102
		10	Kawasan Kumuh	6 ha	8,2 ha	73%



		11	Persentase sanitasi layak	95%	96	101%
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	60%	93%
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan ekonomi	6,30%	6,20%	98%
		14	PDRB Perkapita	53,25 juta	52,50 juta	98%
		15	Indeks Gini	<0,3	<0,3	100%
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	3,5%	5,48	68%
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kontribusi PAD sektor pariwisata	533.555	577.857	108%
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan lama sekolah	14,8 tahun	14,92 tahun	100,8%
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka Rata-rata lama sekolah	78,50%	72,88	92,8%
		20	Indeks pembangunan kesehatan	70,75%	61,53	86,9%
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	21	Angka Harapan Hidup	72,75%	73,36%	100,8 %